

**PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR
PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SESEAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA**



BOSOWA

OLEH

MARTEN DOLO' PALOBO'
45 86 02 00 99

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Jurusan Ilmu
Administrasi Negara

P a d a

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1990

HALAMAN JUDUL

J U D U L S K R I P S I

PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TANA TORAJA

O L E H

MARTEN DOLO' PALOBO'

45 86 02 00 99

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

P a d a

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1 9 9 0

Jangan Nilai Tujuh Hari
kalaupun belum sampai pada
Hari M i n g g u.

S e b a b ada tertulis ,
"Segala jalan T U H A N adalah
kasih Setia dan Kebenaran,
Bagi orang yang berpegang pada
perjanjianNya dan peringatan -
peringatanNya" (Mas : 25 : 10).

Kupersembahkan Untuk kedua
orang Tuaku yang tercinta,
kakakku dan Adikku yang
memberiku dorongan berjuang.

J a n u a r i, 1991.

(M.D. Palobo').

HALAMAN AWAL

J U D U L S K R I P S I

PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TANA TORAJA

O L E H

MARTEN DOLO' PALOBO"

45 86 02 00 99

BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

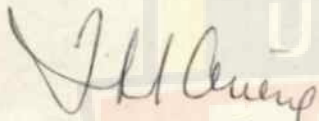
1 9 9 0

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung pandang untuk diajukan pada Panitia Ujian Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

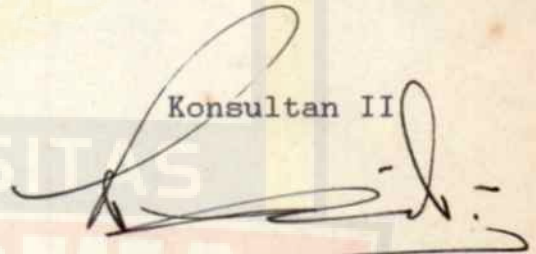
menyetujui

Konsultan I



(Dra. H. Haevah Haneng, M.P.A.)
NIP. 130 336 462


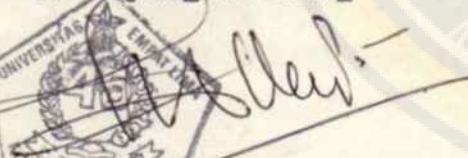
Konsultan II



(Drs. H. Abduh Alfian)

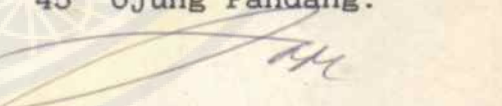
mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
"45" Ujung Pandang



(Drs. H. Muhammad Thala)
NIP. 130 264 141

Ketua Jurusan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas
"45" Ujung Pandang.



(Drs. H. Sadly AD, M.P.A)
NIP. 136 264 141

Tanggal Pengesahan : 8 Januari 1991

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Minggu, 27 Januari 1991

Skripsi atas Nama : Marten Dolo' Palobo'

Nomor Stb/NIRM : 4586020099/871133141

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara

PENGAWAS UMUM

(Prof. Dr. Mr. H. Andi Zainal Abidin Farid) (Drs. H. Sadly Ad. MPA)
Rektor Universitas "45" Dekan Fak. Isipol Unhas

PANITIA UJIAN

(Drs. H. Mohammad Thala)
Ketua

(Drs. Guntur Karnaeni)
Sekretaris

(Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah)
Anggota

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H.M. Syukur Abdullah (.....)
2. Dra. H. Hasyah Haneng, MPA (.....)
3. Drs. A. Syamsuddin MS (.....)
4. Drs. Misbahuddin A, MS (.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai sebagai upaya untuk memnuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan setelah melalui suatu proses yang panjang, mulai dari kuliah, penelitian dan penyusunan sampai terbentuknya seperti sekarang ini.

Oleh karena itu tidak sedikit hambatan atau kesulitan yang dihadapi, utamanya kemampuan suatu karya ilmiah. Akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak segala hambatan atau kesulitan akhirnya dapat teratasi sehingga Skripsi ini dapat mencapai penyelesaiannya walaupun dalam bentuk sederhana.

Olehnya itu pada tempat dan kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, utamanya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang tercinta, Ayahanda Pini' dan Ibunda Bira' Tallo', yang telah mengasuh dan

membesarkan, membiayai, yang banyak memberikan perhatian dan pengorbanan, demikian pula Kakanda yang membantu Orang Tua membiayai dan atas segala do'a restu dan senantiasa mendorong penulis sampai ke tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya.

2. Bapak Prof. Mr. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang, Bapak Drs. H. Mohammad Thala selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang atas kebijaksanaan dan kesediaanya membimbing penulis sebagai mahasiswa selama penulis belajar di Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Sadly AD., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Ibu Dra. H. Hasyah Haneng, M.P.A dan Bapak Drs. H. Abduh Alfian sebagai konsultan yang bersedia untuk meluangkan waktunya serta mencurahkan tenaga pemikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini sampai selesai.
5. Para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Drs. J.L Mapau selaku Kepala Wilayah Kecamatan Sesean beserta staf yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama berada di lokasi penelitian.



7. Bapak Drs. R. Bumbungan adalah keluarga yang banyak memberikan bantuan baik materil maupun moril terutama sewaktu penulis berada di Perguruan Tinggi.
8. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuannya, baik moril maupun materil sampai selesainya Skripsi ini.

Ucapan dan terima kasih ini ditujukan pula kepada segenap handai tolan, kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, khususnya yang turut memberikan bantuan dan memberi dorongan, baik secara langsung selama penulis berada di bangku kuliah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas budi baik yang Bapak berikan kepada penulis dengan berlipat ganda dan mudah-mudahan Skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, para pembaca dan masyarakat.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulisan Skripsi ini hingga selesai, penulis doakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Maha Esa, A m i n.

Ujung Pandang, Desember 1990

P e n u l i s,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ...	5
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN CAMAT	
SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN ...	10
A. Pengertian Konsep Peranan.....	10
B. Beberapa Peranan Camat	13
C. Peranan Camat Sebagai Administrator	21
D. Peranan Camat di Bidang Pemerintahan.	24
BAB III: GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	32
A. Keadaan Geografisnya.....	32
B. Keadaan Demografi.....	34

C. Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Kecamatan	44
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	46
A. Kegiatan Camat Selaku Administrator Pemerintahan.....	46
B. Peranan Camat Sebagai Koordinator	51
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelan- garan Pelaksanaan Peranan Camat Selaku Administrator Pemerintahan	68
D. Masalah-masalah Yang Dihadapi Dalam Pe- laksanaan Fungsi Camat Selaku Administra- tor Pemerintahan	75
E. Mengatasi Masalah-masalah Yang Meng- hambat Camat Selaku Administrator Peme- rintahan.....	79
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
D A F T A R K E P U S T A K A A N	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Luas Kecamatan Sesean Diperinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 1990,	33
2. Penduduk Kecamatan Sesean Diperinci Menurut Desa/Kelurahan Tahun 1989	35
3. Penduduk Kecamatan Sesean Menurut Mata Pencaharian Pokok Tahun 1989	38
4. Luas Panen Dan Produksi Pertanian Di Kecamatan Sesean Tahun 1989	38
5. Penduduk Kecamatan Sesean Menurut Agama Yang Dianut Diperinci Perdesa/Kelurahan Thn. 1989 ...	41
6. Tingkat Pendidikan Di Wilayah Kecamatan Sesean Diperinci menurut Desa/Lurah	43
7. Pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Buta Huruf Diperinci Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Sesean Tahun 1985-1989	55
8. Peristiwa Yang Terjadi Di Kecamatan Sesean Tahun 1989.....	58
9. Perkembangan Sarana Kesehatan Di Wilayah Kecamatan Sesean Tahun 1989	60
10. Realisasi Penyuluhan Saprodi di Wilayah Kecamatan Sesean Tahun 1989,.....	62
11. Jenis Hutan Yang Ada Di Kecamatan Sesean,.....	63

12. Penyebaran Bibit Ternak Di Wilayah Kecamatan matan Sesean Tahun 1986-1989.....	65
13. Tanggapan Responden Terhadap Hubungan Kerja Camat dan Instansi Vertikal Di Kecamatan Sesean..	66
14. Tanggapan Responden Terhadap Hubungan Kerja Camat Dengan Dinas-dinas Daerah,.....	67
15. Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan-kegiatan Camat Selaku Administrasi Di Kecamatan Sesean,....	68
16. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pendidikan Masya- rakat di Kecamatan Sesean.....	69
17. Tingkat Pendidikan Aparat Kecamatan Dan Desa/ Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Sesean.....	70
18. Tanggapan Respondedn Tentang Partisipasi/Kesa- edaran Masyarakat Dalam Pembaharuan Pembangunan Di Kecamatan Sesean.....	77
19. Tanggapan Responden Tentang Kebijakanaksanaan Camat Dalam Mengintruksikan / Penegasan Pada Aparat Desa / Kelurahan.....	80
20. Tanggapan Atas Pelaksanaan Fungsi Camat di Ke- camatan Sesean.....	84
21. Tanggapan Responden Tentang Kebijakanaksanaan Camat Dalam Mengadakan Pembinaan Masyarakat di Ke- cama tan Sesean.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Daftar Susunan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah pada Kantor Kecamatan Sesean. Keadaan 31 Maret 1989	91
Struktur Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan/Serta Aparat Wilayah Kecamatan Sesean	100
Peta Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja	101
Peta Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja	102
Peta Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan	103

ABSTRAKSI

Camat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan beserta perangkat lainnya yang mempunyai tugas untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Wilayah Kecamatan dan sekaligus bertanggung jawab kepada Kepala daerah Tingkat II.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Wilayahnya yang meliputi wilayah Desa/Kelurahan hendaknya dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu segala tindakan di dalam melakukan kegiatan dan pengembangan secara optimal melalui kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan secara keseluruhan.

Camat sebagai administrator pemerintahan merupakan pelaksana kebijaksanaan atasan langsung yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II sehingga diperlukan kecakapan dan keterampilan administrasi maupun operasional untuk menterjemahkan secara terperinci semua kebijaksanaan yang dilimpahkan kepadanya untuk menjadi dasar dan pedoman di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Hal tersebut sangat diperlukan utamanya dalam melaksanakan tugas Camat di bidang pemerintahan dalam perencanaan, koordinasi maupun pengendalian dan pengawasan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Camat sebagai administrator Pemerintahan dan keterkaitannya dengan Instansi-instansi vertikal dan Horizontal dengan memilih wilayah Kecamatan Sesean Kabupaten daerah Tingkat II Tana Toraja sebagai lokasi dan sasaran penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sesean pada dasarnya telah terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan, demikian pula hubungannya dengan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal sudah berjalan dengan baik walaupun Camat masih sering menghadapi berbagai tantangan dimana Camat sebagai penanggung jawab pemerintahan di wilayahnya memiliki kemampuan yang terbatas untuk itu Camat dituntut lebih aktif meningkatkan kemampuannya baik di bidang administrasi maupun di bidang operasional sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini secara menyeluruh dan merata, mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah dan seterusnya ke tingkat Kecamatan dan Desa di seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan itu sangat diharapkan adanya partisipasi dari seluruh aparat pemerintah sampai kepada tingkat yang terendah, mengingat bahwa sasaran utama pembangunan Nasional adalah masyarakat pada unit-unit pemerintahan yang terendah.

Berkembangnya pembangunan di segala bidang berarti pula mengandung adanya tugas dan tanggung jawab pemimpin yang berkedudukan di wilayah itu. Keberhasilan dalam pembangunan itu adalah apabila dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Pembangunan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Camat sebagai Kepala Wilayah. Camat bertanggung jawab memelihara terlaksananya pembangunan secara terarah dan jalannya roda pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan mensekresikan usaha-usaha pembangunan daerah, maka melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

telah ditetapkan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan yang diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Pelaksanaan tugas dimaksudkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari pemerintah yang dipercayakan kepada Kepala Wilayah atau Kepala Instansi atasannya kepada Pejabat di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan masyarakat terutama di daerah pedesaan secara tertib dan bertanggung jawab.

Di tingkat Kecamatan, Camat sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di wilayahnya dan juga sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

Sebagai administrator pemerintahan Camat memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang berarti Camat melaksanakan tugas rumah tangga Daerah Tingkat II yang diserahkan kepadanya. Dalam tugas Camat yang kompleks ini ia dibantu oleh aparat pemerintah Kecamatan bersama Instansi Vertikal dan Horizontal yaitu Dinas-dinas Daerah yang ada di Wilayahnya.

Atas dasar pembahasan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana pelaksanaan peranan Camat sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja.

Dari keadaan itulah mendorong penulis membahas masalah ini sesuai dengan bidang keahlian administrator Negara dengan bertitik tolak pada pokok-pokok pembahasan yang berjudul " Peranan Camat sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja "

Adapun alasan-alasan memilih judul ini adalah:

1. Dalam hubungan ini penulis mengkaji sejauh mana peranan Camat di bidang pemerintahan sebagai penguasa tunggal di Wilayah Kecamatan yang berkewajiban untuk memelihara lancarnya roda pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, yang dibebankan kepadanya.
2. Dan sejauh mana peranan Camat di bidang pemerintahan di dalam menjalankan fungsinya, dan melakukan koordinasi antara Jawatan-jawatan Vertikal maupun Horizontal/Dinas-dinas Daerah yang berada di Wilayahnya serta mengawasi dan membimbing pemerintahan, Desa/Kelurahan yang ada di wilayah kekuasaannya.
3. Bahwa perkembangan pemerintahan di pemerintahan di Wilayah Kecamatan Camat mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.

B. Perumusan Masalah

Seperti telah dijelaskan judul Skripsi ini yaitu: "Peranan Camat sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja".

Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan kebijaksanaan pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah di tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Dengan demikian Camat selaku administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan, sebagai pimpinan yang harus bertanggung jawab dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk tetap menjaga dan menjalankan tugas-tugas yang diembannya itu dengan baik dan lancar untuk mencapai sasaran yang dikehendaki.

Sesuai dengan Judul Skripsi ini yaitu "Peranan Camat sebagai Administrator Pemerintahan di Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja", maka dalam penguraian Skripsi ini penulis membatasi diri sehingga ruang lingkup pembahasan yang menjadi fokus penelitian penulis adalah:

1. Kegiatan-kegiatan apa dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Camat selaku administrator pemerintahan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan

fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan ?

3. Masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Camat selaku administrator pemerintahan ?
4. Apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan ?

Setelah mengemukakan batasan masalah ini berarti sudah menggambarkan ruang lingkup pembahasan dalam penulisan Skripsi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Camat selaku administrator pemerintahan dan bagaimana pelaksanaannya ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan.
3. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan.
4. Untuk mengetahui apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan.



b. Kegunaan Penelitian diharapkan

1. Sebagai bahan informasi baik bagi pemerintahan Kecamatan Sesean tentang pelaksanaan peran Camat sebagai administrator pemerintahan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi Daerah-daerah lain utamanya dalam rangka penyelenggaraan administrator pemerintahan.
3. Dapat memberikan gambaran mengenai ketertiban masyarakat dan peranan Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja. Khusus bagi Pemerintahan Daerah Tana Toraja hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kejelasan tentang dan sebagai masukan bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka pembangunan di masa yang akan datang.

D. Metode Penelitian.

Suatu pembahasan mencapai dan menentukan kebenaran perlu ada cara-cara untuk mencapai kebenaran itu antara lain adalah cara yang sering atau lazim digunakan atau tiga metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang penulis lakukan dengan cara membaca dan mempelajari karya - karya atau bahan-bahan literatur, majalah maupun surat kabar atau bahan-bahan tertulis lainnya baik berupa

laporan -laporan, dokumen-dokumen, Peraturan-peraturan Daerah yang ada hubungannya dengan maksud untuk memperoleh data dan landasan teori yang relevan penyusunan Judul Skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan di Wilayah Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Toraja. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini maka pengumpulan data dilakukan melalui :

1.1 Pengamatan (observasi) diharapkan kepada seluruh aktivitas pelaksanaan administrasi pemerintahan Kecamatan yang erat hubungannya dengan materi penyusunan skripsi ini.

2.1 Teknik interviu (wawancara), wawancara langsung dengan Kepala Wilayah Kecamatan aparat Kecamatan instansi vertikal dan dinas-dinas yang berada di Kecamatan Sesean serta anggota/tokoh-tokoh masyarakat dan aparatnya.

3. Penetapan sampel.

Dalam penelitian ini sampel ditetapkan secara purposive berdasarkan pertimbangan secara cermat dengan melihat lokasi penelitian yang cukup luas. Adapun sampel responden dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Tokoh-tokoh masyarakat terdiri dari :
 - Tokoh-tokoh Adat : 5 orang
 - Tokoh-tokoh Agama : 5 orang
 - Tokoh-tokoh Pendidik : 5 orang
 - Tokoh-tokoh Tani : 5 orang

 - b. Dari Kantor Pemerintahan Kabupaten yaitu :
 - Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Tanah Toraja : 1 orang
 - Aparat Pemerintahan Daerah : 2 orang

 - c. Kepala Kantor Wilayah Kecamatan bersama Sekretaris Wilayah Kecamatan Sesean sebanyak 2 orang yaitu :
 - Staf pemerintahan sebanyak : 5 orang
 - Instansi vertikal dan dinas daerah

 - d. Aparat Desa / Kelurahan terdiri dari, Ketua LKMD/Kepala Desa /Kelurahan bersama sekretaris Desa / Kelurahan dan pengurus LKMD masing-masing 5 orang : 15 orang
- Jadi rekapitulasi responden adalah sebagai berikut :
- Aparat Pemerintahan sebanyak : 25 orang
 - Tokoh-tokoh masyarakat : 20 orang
-
- J u m l a h : 45 orang

E. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Teoritis Tentang peranan Camat Sebagai Administrator Pemerintahan yang terdiri dari pengertian konsep peranan, Beberapa peranan Camat sebagai Administrator peranan camat dibidang Pemerintahan.

Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Wilayah Penelitian yang terdiri dari Keadaan Geografis, Keadaan Demografi dan Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Bab Keempat yaitu Analisa Peranan Camat sebagai Administrator Pemerintahan yang terdiri dari Kegiatan Camat Selaku Administrator Pemerintahan, Peranan Camat Sebagai Koordinasi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Camat Selaku Administrator Pemerintahan.

Bab Kelima merupakan sub penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

B A B. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep Peranan

Sesuai dasar pembahasan selanjutnya maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang konsep peranan yang sehubungan dengan judul skripsi ini sebagai titik tolak pembahasan selanjutnya.

Adapun pengertian konsep peranan etimologis adalah sebagai berikut :

Drs. Yulius S. dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa " Peranan adalah tugas untuk melakukan kewajiban peran:.. (Yulius S, 1984-1979).

Selanjutnya Drs. H.Jumari Ismanto dalam bukunya Peranan Wanita Dalam Pembangunan menjelaskan bahwa peranan adalah "Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang peran utama dalam terwujudnya sesuatu hal". (Jumari 1980:12).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka peranan adalah merupakan tugas kewajiban untuk dilaksanakan demi terwujudnya sesuatu hal.

Secara administrasi dan manajemen, maka pengertian peranan adalah merumuskan tentang bagaimana cara sebagai seorang pemimpin ia harus dapat mengharapkan bawahannya itu diperlukan kegiatan dari pimpinan agar para pegawai mengetahui tugas masing-masing dan mencegah jangan timbul

kesalah pahaman.

Pimpinan hendaknya dapat memperhatikan secara serius situasi organisasi yang dipimpinnya.

Seorang Camat harus mampu mempergunakan dan memanfaatkan hubungan antara eksekutif dengan bawahan, dapat mempersatukan seluruh keinginan kebutuhan bawahan, menciptakan adanya persatuan, menyadari dan mengatasi adanya unsur-unsur pysiologis yang mempengaruhi organisasi, bertindak demikian rupa agar tindakan tersebut dapat membawa kegairahan para bawahan.

Di samping berpegang kepada penerapan unsur organisasi administrasi dan manajemen, juga seorang Camat dapat bertindak sebagai administrator dalam rangka pelaksanaan tugasnya yaitu berfungsi sebagai unsur pembaharu.

Dalam peranannya yang demikian Camat dapat menjadi sumber inovasi bagi pembinaan, gagasan strategi yang menunjang pembangunan. Selain itu melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai pelopor pembaharuan.

Niti sumitro S. Alex Ec dalam bukunya Manajemen Personaliala merumuskan bahwa peranan administrator adalah:

- " 1. Kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaharuan dalam berbagai kebijaksanaan atau suatu rencana maupun realisasi pelaksanaannya. Juga kemampuan melihat kait-mengait berbagai segi yang perlu ditimbuhkan dengan tidak kehilangan prioritasnya.
2. Kesediaan dan kemampuannya untuk mengadakan

penyempurnaan-penyempurnaan dalam bidang administrasi pembangunan.

3. Penataan kembali struktur organisasi pemerintahan tata hubungan kerja antara lembaga yang ada administrasi kepegawaian dan bidang tata kerja prosedur".
(Niti Sumitro S. Alex., 1979 : 263).

Berdasarkan defenisi tersebut di atas maka untuk menganalisa peranan dan fungsi eksekutif, seorang Camat baik sebagai kepala, maupun sebagai eksekutif dan sebagai administrator pembaharuan, sangat memegang peranan utama dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga seorang Kepala Wilayah Kecamatan harus memiliki pendidikan dan pengetahuan yang luas terutama yang menyangkut hal-hal yang ada hubungannya dengan sifat dan jenis tujuan yang hendak dicapai, mempunyai kemampuan yang berpikir secara konsepsional, kemampuan untuk mendefinikasikan hal-hal yang strategis dapat menunjang perencanaan yang ada di Wilayah kekuasaannya.

Selain itu seorang Camat harus terjun secara langsung melihat permasalahan-permasalahan dan berkomunikasi tatap muka dengan aparatur di tingkat bawahannya seperti Kepala Desa/Kelurahan, sehingga dengan adanya komunikasi secara langsung akan menimbulkan rasa dekat dengan aparat di bawahnya.

Mereka merasa bahwa mereka diperhatikan oleh atasannya dan atasannya akan menimbulkan motivasi yang kuat pada dirinya untuk mengabdikan kepada masyarakat dengan baik.

Dengan demikian peranan adalah sesuatu yang jadi bagian - pimpinan yang terutama untuk terjadinya sesuatu hal atau peristiwa dengan melakukan kewajiban dalam pencapaian sesuatu tujuan.

Peranan timbul karena seorang memahami bahwa ia berkeja tidak sendirian. Dalam arti bahwa ia mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi dengan bawahannya.

B. Beberapa Peranan Camat.

1. Peranan Camat sebagai kepala dalam menyelenggarakan pemerintahan di Wilayah Kecamatan. Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Walikota, maka Camat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi pembantu Bupati/Walikota. Camat mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pada pasal 77 dan 78 dikemukakan bahwa:

"Camat adalah seorang Kepala dari suatu Wilayah yang disebut Kecamatan. Seorang Kepala Kecamatan diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala daerah Tingkat II sebagai atasannya secara formil"

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang berada di bawah tanggung jawab kepada Bupati/Walikota/Kepala daerah.

Camat berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan kata lain Camat adalah penguasa tunggal di wilayahnya selain itu ia adalah administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 80 dirumuskan bahwa :

"Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayah dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang"
(Undang-undang No. 5 Tahun 1974:65).

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berhasil tidaknya suatu pembangunan tergantung pada seorang pemimpin pemerintahan yang dapat mempengaruhi bawahannya, sehingga mereka dengan kemauan sendiri memberikan

kepercayaan, respek dan loyal dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya.

2. Peranan Camat sebagai Pembina.

Camat harus membina masyarakat yang ada di wilayahnya, mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembinaan tidak saja mencakup pemeliharaan tetapi juga memajukan dan mengembangkan.

Pembinaan ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, di antaranya adalah pelanggaran hukum yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan manusia.

Pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban ini menuju ke arah ketertiban masyarakat adalah tugas kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang terletak di dalam seluruh wilayah negara, termasuk di dalamnya keamanan.

Sehubungan dengan luasnya wilayah Kecamatan dan untuk menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya, maka dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban itu, dalam keadaan biasa,



kepada Kepala Wilayah perlu diberikan beberapa wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya yang meliputi :

- a. Wewenang pengaturan untuk dapat mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana-bencana;
- c. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya

Sebelum Kepala Wilayah menentukan kebijaksanaannya ia diwajibkan untuk mengadakan musyawarah dengan pimpinan Badan-badan/Aparat keamanan yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama menilai keadaan apabila gangguan keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Sesuai dengan sifat hakekat dan bentuk kebijaksanaan untuk meniadakan atau mencegah gangguan itu.

3. Peranan Camat Sebagai Manajer.

Camat sebagai manajer dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada aktivitas dan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol atau pengawasan.

Tentang konsep manajemen dikemukakan definisi sebagai berikut :

3.1 H. Koonts & O'Donnel mengemukakan bahwa :

"Manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu

tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang - orang lain" (H.Koonts & O'Donnel, 1981 : 19)

3.2 T. Degenara memberikan definisi manajemen sebagai berikut :

"Manajemen adalah sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas harus dicapai manusia dan bukan tenaga manusia" (T.Deganara, 1983 : 15).

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa manajemen adalah setiap aktivitas yang terdiri atas perencanaan, organisasi dan atau pelaksanaan serta kontrol, atau dengan kata lain bahwa manajemen adalah merupakan suatu proses mengatur, membimbing serta memimpin atau menggerakkan manusia untuk mencapai suatu tujuan.

Setelah pengertian-pengertian manajemen telah dikemukakan di atas, maka penulis juga akan mengemukakan organisasi sebagai wadah, atau sebagai tempat Bergeraknya manajemen.

Drs.S.P. Siagian, M.P.A dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi sebagai berikut :

"Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formil terikat dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang/beberapa orang atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan" (S.P. Siagian, 1970 : 18).

Selanjutnya pengertian organisasi dikemukakan oleh John M.Gaus sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab" (John M.Gaus, 1986 : 124).

Dari pengertian di atas jelas bahwa organisasi diwujudkan oleh sekelompok orang yang berserikat dan melakukan suatu kerja sama untuk mencapai suatu tujuan mereka telah tentukan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat suatu hubungan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi atau kelompok orang, hubungan mana di ikuti oleh tugas bersama guna mencapai tujuan.

Dalam hubungan dengan pekerjaan seorang manajer ia harus dapat menjamin bahwa setiap pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kualitas. Ia harus mengorganisasikan semua pekerjaan dan berusaha menerapkan metode-metode kerja yang baik. Ia hendaknya melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, dan juga terhadap semua penggunaan maupun pemeliharaan alat-alat yang ada. Gdalam hubungan dengan orang-orang

bawahan, seorang manajer harus berada di antara para bawahan yang dipimpinnya.

Secara umum peranan seorang manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Artinya ia bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari pada semua pekerjaan yang diembankan kepadanya.

4. Peranan Camat Sebagai Eksekutif.

Camat adalah seorang eksekutif, seorang pelaksana tugas pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan seorang kepala eksekutif hanyalah dapat berhasil dengan baik jika ia menjalankan fungsi-fungsi manajemen.

Peranan Kepala Eksekutif harus dipelajari bukan hanya dari segi pelayanan pemerintahan semata terhadap masyarakat, akan tetapi terutama harus dilihat pada kekuasaan politiknya yang harus dijalankan.

Karenanya Camat harus membuat rencana sebelum ia bekerja dimana tercakup penentuan tujuan. Ia harus mengadakan pembagian pekerjaan, mencari orang yang tepat dan pada tempatnya untuk melaksanakan pekerjaan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, mengadakan latihan pegawai, dan pada akhirnya mengadakan kontrol atas apa yang telah dilakukan yaitu mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana.

Camat harus mampu mengadakan dan memanfaatkan

hubungan antara eksekutif dan bawahan dengan mempersatukan seluruh keinginan bawahannya, menciptakan adanya persetujuan. Ia menyadari adanya unsur psikologis yang mempengaruhi eksekutif dan bawahannya, yang akan merupakan suatu kehormatan baginya, mempersatukan tenaga bawahannya secara harmonis sehingga timbul kesadaran tentang tumbuhnya suatu kesadaran baru. Sikap acuh tak acuh berubah menjadi semangat, keraguan menjadi keyakinan, keseluruhan menjadi gairah kerja. Sebenarnya jika tahap ini sudah tercapai, eksekutif telah meningkat menjadi seorang pemimpin.

5. Peranan Camat Sebagai Komandan.

Kadang-kadang dalam keadaan tertentu Camat bertindak sebagai seorang komandan. Sehari-hari ia adalah komandan pagar praja. Dalam keadaan darurat ia tidak sempat mempertimbangkan, karena keputusan harus cepat diambil dan ia tidak lagi menganjurkan tetapi memerintah. Oleh karena itu Camat harus memahami syarat-syarat menjadi komandan yang baik.

Seorang komandan dalam rangka menggerakkan bawahannya kiranya senantiasa menggunakan wewenang yang ada dengan sebaik-baiknya karena apabila menyalahgunakan wewenang yang ada, maka tidak akan mendapat dukungan dari pada bawahannya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang yang mempunyai kewenangan belum tentu mempunyai kekuasaan menjadi

komandan, yakni kekuasaan untuk menggunakan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan.

Oleh karena seorang komandan yang mempunyai kewenangan belum tentu mampu memerintah, belum tentu memperoleh bantuan dari pihak yang dipimpin.

C. Perananan Camat Sebagai Administrator.

Selanjutnya seorang Camat adalah seorang administrator, khususnya administrator pemerintahan diwilayahnya. Suatu program kerja dalam pembangunan yang akan dijalankan pada suatu wilayah akan terwujud dan terlaksana dengan baik jika tata bermasyarakat antara administrator dengan tata bermasyarakat di lingkungan tempat kerjanya.

Seorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila seorang administrator yang menjadi atasannya mengenal jiwa orang tertentu.

Dengan demikian pemimpin suatu organisasi perlu mengetahui tentang jiwa bawahannya, karena ia sangat menentukan jalannya dan berhasil tidaknya penerapan suatu program kerja. Setiap bawahan yang melakukan kerja sama dalam suatu organisasi mempunyai jiwa kemamuan dan pola berpikir yang berbeda. Oleh karena itu seorang administrator harus dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan itu agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Oleh karena itu Camat dalam melaksanakan pemerintah di daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya harus melaksanakan berbagai tugas yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintah lainnya yang tidak bermaksud dalam tugas suatu instansi dan rumah tangga daerah. Demikian pula pelaksanaan tugas yang menyangkut pembinaan masyarakat di bidang ekonomi desa serta tugas-tugas keagrarian.

Dalam kaitannya dalam Camat sebagai administrator pemerintahan diuntut kemampuan operasional. Adapun kemampuan teknis operasionalnya :

1. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada aparat bawahannya.
2. Mengadakan peninjauan atau supervisi lapangan terhadap proyek-proyek sarana dan prasarana serta pemanfaatannya.
3. Menyusun laporan tentang hasil-hasil temuan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Di dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan administrasi tidak menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dilaksanakan oleh orang-orang pelaksana.

Seorang administrator atau pemimpin usaha harus mampu dan berdaya guna mempekerjakan, pemimpin serta menggerakkan bawahannya agar mereka mau bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi itu ada sebab dibangkitkan oleh seorang yang disebut administrator. "Kepala Organisasi" yang harus membuat organisasi yang dipimpinnya itu hidup, tumbuh dan bergerak.

Cara administrator menjalankan administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan organisasi,
- b. Mengembangkan sistem informasi (terutama tata usaha), dan
- c. Mengembangkan sistem manajemen.

Adapun administrasi dan administrator itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi merupakan konsekuensi /akibat lanjut dari pada setiap orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang harus diemban secara terus menerus untuk mencapai tujuan.

Administrasi adalah fungsi utama yang harus dijalankan oleh administrator. Yang harus diadministrasikan adalah semua sasaran obyek dari pada tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan

dan menggerakkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh team bawahannya, terutama para manajer dan staf.

Administrasi pemerintahan dalam kaitannya berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Maksudnya ialah bahwa suatu negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lain dalam melaksanakan kegiatan yang harus dilandaskan dengan hukum, atau harus bertanggung jawab secara hukum. Dengan landasan ini, maka setiap tindakan pemerintah harus mempertahankan dua kepentingan atau landasan ialah kegunaannya dan landasan hukumnya.

D. Peranan Camat di Bidang Pemerintahan.

Wilayah Kecamatan sebagai pemerintahan terbawah di atas pemerintahan desa yang mempunyai peranan dan fungsi yang luas dan kompleks. Dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah, seorang Camat dapat berperan selaku Kepala eksekutif dan administrator.

Drs. Bayu Suryaningrat merumuskan tentang peran Camat dibidang pemerintahan dalam bukunya Tugas, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab Camat sebagai berikut :

1. Memelihara lancarnya roda pemerintahan, berkewajiban untuk tertib umum, serta menjalankan tugas pemerintahan umum pusat, dan

- pemerintahan daerah dibebankan kepadanya.
2. Melakukan koordinasi langsung antara jawatan-jawatan vertikal maupun horizontal diwilayahnya.
 3. Mengawasi, membimbing dan membina pemerintahan desa di wilayahnya menuju desa swasembada dan desa Pancasila.
 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara jalannya roda pemerintahan dan mengindahkan unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.
 5. Mengenai adat istiadat masyarakat umum, terutama ketentuan dalam masyarakat desa dan mengatur dalam rumah tangganya sendiri dengan mengingat dan mengetahui setiap perkembangan."
- (Suryaningrat Bayu, 1981 : 79).

Di samping itu Camat dapat bertanggungjawab untuk :

- a. Membimbing desa di bawah pembinaannya dalam rangka pendewasaan menuju desa swasembada dan desa Pancasila, misalnya dengan petunjuk-petunjuk yang mendorong dan bermanfaat dalam rapat mingguan.
- b. Meninjau desa-desa dan memberikan bimbingan pemerintahan administrasi desa, terutama dalam hal administrasi keuangan dan register desa serta perbendaharaan desa.
- c. Paling sedikit dalam lima bulan sekali memeriksa Kas dan administrasi desa, karena Camat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik; ia harus mengganti rugi (menurut pasal 74 I.C.W) bila terjadi penggelapan oleh bawahannya karena kelalaian dalam pengawasan.
- d. Mengawasi surat-surat perjanjian bagi hasil yang



dilakukan di hadapan Kepala Desa jangan sampai ada yang dirugikan.

Bertitik tolak dari pembahasan di atas sebagai mana dikatakan didalam Buku Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah mana :

- a. Pemerintah wilayah Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan.
- b. Pemerintah wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum wilayah Kecamatan.
- c. Instansi otonom adalah aparat pemerintahan daerah Tingkat I dan atau aparat pemerintah Tingkat II yang ditempatkan dan mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kecamatan.
- d. Instansi vertikal adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai lingkungan kerja diwilayah Kecamatan.
- e. Unsur aparat departemen Dalam Negeri yang terdiri aparat Agraria dan Hansip yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan memperhatikan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, menurut Undang-undang No. 5 tahun

1974 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepala Daerah harus merupakan otonomi yang nyata yang bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan pemberian otonomi kepala Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan tugas pembantuan.
4. Pemberi otonomi kepada daerah mengutamakan asas
5. Tujuan pemberian otonomi tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sebagai daerah otonom maka pemerintah daerah memerlukan dinas-dinas daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pemerintah Daerah berhak untuk membentuk dinas-dinas daerah yang susunan

organisasinya dan formasinya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyelenggaraan bidang pemerintahan di Wilayah Kecamatan meliputi antara lain :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengumpulkan dan menyusun data monografis.
- c. Melaksanakan ketentuan pendaftaran penduduk.
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang agraris.
- e. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan.

Bidang Keamanan dan Ketertiban meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan dibidang keamanan dan ketertiban.
- b. Melaksanakan tugas-tugas keprajaksaaan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melaksanakan tugas di bidang pembinaan pertahanan sipil dalam mendukung tugas-tugas Hankamnas,
- d. Mengamankan pelaksanaan peraturan daerah,
- e. Menyusun tata pelaporan di bidang keamanan ketertiban.

Bidang Pembinaan meliputi kegiatan-kegiatan :

- a. Melaksanakann kegiatan usaha dibidang pembinaan idiologi,

- b. Melaksanakan usaha di bidang politik di dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa,
- c. Menyusun laporan tentang pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bidang Kesejahteraan rakyat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan usaha-usaha dibidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b. Mengumpulkan data dibidang sosial,
- c. Memberikan pertimbangan perizinan usaha dan kegiatan sosial,
- d. Memberikan bantuan moril maupun materil terhadap usaha dibidang keamanan, pendidikan dan kebudayaan,
- e. Meningkatkan sarana olah raga, pramuka dan parawisata,
- f. Meningkatkan kegiatan dibidang kesehatan, keluarga berencana serta keberhasilan lingkungan.

Bidang perekonomian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- b. Membantu instansi yang bersangkutan dalam usaha

penyediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan masyarakat.

- c. Membantu usaha perekonomian rakyat pedesaan
- d. Membantu usaha dalam pembangunan Desa terutama penggalan sumber-sumber di desa.

Bidang pembangunan masyarakat desa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa,
- b. Melaksanakan latihan keterampilan masyarakat desa,
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Sosial Desa,
- d. Menyelenggarakan administrasi pengolaan bantuan keuangan.
- e. Menyelenggarakan administrasi bantuan masyarakat.
- f. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Bidang pemungutan pajak dan keuangan yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengawasi pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak.
- b. Menyusun administrasi pengumutan pajak di wilayah Kecamatan.
- c. Menerima, menyimpan dan menyetor uang dari hasil

pemungutan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Mempertanggung jawabkan keuangan yang diperoleh dari pemungutan pajak.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Wilayah Kecamatan tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab di bidang pemerintahan dan pembangunan yang meliputi berbagai pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana serta program kerja secara optimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Camat, selaku administrator berfungsi sebagai stabilisator, inovator dan pelopor dalam masyarakat ke arah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Di samping itu Camat sebagai administrator juga berfungsi untuk mampu berdaya guna dan berhasil guna mempekerjakan, memimpin serta menggerakkan bawahannya agar mereka mau bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat pemerintah Wilayah Kecamatan secara terperinci dapat dilihat pada daftar lampiran pada skripsi ini.

B A B III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografisnya.

Keadaan Geografis (Letak dan luas wilayah) Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dengan luas wilayah 3.630,12 Km² terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan. Kecamatan Sesean yang terletak disebelah Utara Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja dipilih sebagai lokasi penelitian.

Kecamatan Sesean mempunyai batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rantepao dan Kecamatan Sanggalangi.
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Rinding Alo.

Kecamatan Sesean memiliki luas wilayah yang terdiri dari satu kelurahan dan 13 desa. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kecamatan Sesean secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL 1
 LUAS KECAMATAN SESEAN DI
 PERINCI MENURUT DESA / KELURAHAN
 (TAHUN 1990)

No.	DESA / KELURAHAN	DUSUN	LUAS (KM2)	KET
1.	Pangli Palawa'	6	14	-
2.	Sangakungan	3	11	-
3.	Sesean Suloaara'	4	10	-
4.	Sesean Landorundun	6	9,75	-
5.	Sesean Matallo	5	16	-
6.	Bori' Parinding	8	20	-
7.	Sa'dan Matallo	4	19	-
8.	Sa'dan Malimbong	4	20	-
9.	Sa'dan Ulusalu	3	19	-
10.	Sa'dan Ballopadange	3	22	-
11.	Lilikira'	2	19	-
12.	Palangi'	4	20	-
13.	Balusu	4	18	-
14.	To'yasa Akung	2	11	-
! J u m l a h		! 58	! 228,75	! -

Sumber Data: Kantor Urusan Statistik Kecamatan Sesean

Tahun 1990.

Dari tabel yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa Desa Ballo Pasange mempunyai wilayah yang paling luas yaitu 22 Km^2 dan mempunyai 3 Kepala Dusun.

B. Keadaan Demografi.

Di dalam membahas mengenai demografi Kecamatan Sesean penulis hanya menguraikan dari segi :

2.1. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Sensus penduduk di Kecamatan Sesean tahun 1989 jumlah penduduk adalah sebanyak 42.837 jiwa orang yang tersebar pada 14 Desa/Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2

PENDUDUK KECAMATAN SESEAN
DIPERINCI MENURUT DESA/KELURAHAN
(TAHUN 1989)

NO.	! DESA/KEL	! JENIS KELAMIN		! JUMLAH
		! PRIA	! WANITA	
1	! Sesean Suloara'	! 1533	! 1513	! 3046
2	! Sesean Matallo	! 1630	! 1600	! 3230
3	! Bori' Parindang	! 2645	! 2495	! 5140
4	! Pangli Palawa'	! 1722	! 1760	! 3482
5	! Palangi'	! 1398	! 1460	! 2858
6	! Lilikira'	! 1055	! 1052	! 2107
7	! B a l u s u	! 1406	! 1392	! 2798
8	! Sa'dan Matallo	! 1552	! 1570	! 2122
9	! Sa'dan Malimbong	! 1743	! 1669	! 3412
10	! Sangakungan	! 1323	! 1275	! 2598
11	! Sesean Landorundun	! 1398	! 1517	! 2915
12	! To'yasa Akung	! 1193	! 1178	! 2371
13	! Sa'dan Ulusalu	! 1460	! 1510	! 2970
14	! Sa'dan Ballopasange	! 1380	! 1408	! 2788
	! J u m l a h	! 21438	! 21399	! 42.837

Sumber Data: Kantor Urusan Statistik Kecamatan Sesean
Tahun 1990.



Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas nampak bahwa kepadatan penduduk tidak merata.

Pada tabel di atas nampak bahwa Desa/-Kelurahan yang paling banyak jumlahnya adalah Desa Bori' Parindang yaitu sebanyak 5140 jiwa orang, dan Desa/Kelurahan yang kurang jumlah penduduknya adalah Desa Lilikira' yaitu 2107 jiwa orang.

2.2. Mata Pencapaian

Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara agraris. Masalah proses pembangunan dapat dilihat dari beberapa faktor penting yang berhubungan dengan ekonomi. Demikian pula di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja khususnya di Kecamatan Sesean umumnya bergerak di bidang pertanian dan sebagian adalah pegawai, pengusaha dan lain-lain. Data Pendapatan masyarakat yang Penulis dapatkan di Kantor Kecamatan Sesean ternyata 82 sampai 95 persen adalah berasal dari sektor pertanian dalam arti yang luas, dan selebihnya berasal dari sektor lainnya. Kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan pendapatan yang mempengaruhi segala kegiatan produksi dan

usaha pembangunan. Selanjutnya untuk membangun sektor pertanian di Kabupaten Derah Tingkat II TanaToraja khususnya di Kecamatan Sesean serta meningkatkan produksinya, maka pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat mulai sekarang ini memikirkan cara-cara apa yang sebaiknya ditempuh dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional.

Mata pencaharian, penduduk Kecamatan Sesean pada umumnya adalah petani, karena luasnya wilayah yang tersedia untuk areal pertanian. Tanah pertanian ini diusahakan untuk berbagai jenis tanaman di mana hasil produksinya di samping untuk dipasarkan, juga untuk kebutuhan rumah tangga.

Menyangkut mata pencaharian penduduk Kecamatan Sesean menurut data tahun 1989 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

TABEL 3

PENDUDUK KECAMATAN SESEAN
MENURUT MATA PENCAHARIAN POKOK
(TAHUN 1989)

No.	Pekerjaan Pokok	Jumlah	Keterangan
1.	P e t a n i	17.361	-
2.	P e n g u s a h a	677	-
3.	P e g a w a i	622	-
4.	L a i n - l a i n	12.759	-
	J u m l a h	31.459	-

Sumber Data : Kntor Kecamatan Sesean Tahun 1989

Mengenai jenis tanaman, luas panen serta jumlah produksi yang dicapai untuk lebih jelasnya dapat pula dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

TABEL 4

LUAS PANEN DAN PRODUKSI PERTANIAN
DI KECAMATAN SESEAN
(TAHUN 1989)

No.	JENIS TANAMAN	LUAS PANEN (HA)	PRODUKSI TON
1.	P a d i	2.402	14.482
2.	J a g u n g	4	18
3.	Ubi-ubian	200	600
4.	Kacang-kacangan!	57	342
	J u m l a h	2.663	14.332

Sumber Data: Kantor Statistik Kecamatan Sesean

Tahun 1990

Produksi pertanian dari masyarakat Kecamatan Sesean sering mengalami kemunduran, disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun sebagian besar penduduk Kecamatan Sesean bergerak di bidang pertanian, tetapi tidaklah berarti bahwa mata pencaharian semata-mata pada bidang pertanian saja. Pada umumnya penduduk mengerjakan sawahnya pada waktu musim hujan, disebabkan karena sawah-sawah penduduk adalah sawah-sawah tadah hujan. Mereka berusaha melanjutkan pencariannya guna menambah penghasilan dengan bergerak pada bidang-bidang seperti:

- a. Peternakan
- b. Perkebunan
- c. Perindustrian dan kerajinan

Perindustrian kerajinan juga mempunyai potensi yang paling besar sekaligus dapat mendukung pengembangan industri pariwisata.

2.3. Agama/Kepercayaan

Pembangunan materiel dan spritual harus selaras dan serasi, dimana perkembangan kehidupan keagamaan yang diarahkan pada terwujudnya kerukunan hidup terhadap umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, demikian pula antara umat beragama dengan pemerintah.

Seperti halnya bagi masyarakat Kecamatan

Sesean toleransi beragama untuk semua golongan berjalan dengan baik berkat adanya saling pengertian diantara pemeluknya, hal mana nampak dalam kehidupan sehari-hari dari falsafah Negara kita yang ada di dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal yang ke 29 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

1. Negara berdasarkan atas Ke Tuhan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu" (Undang-undang Dasar 1945;26).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan dalam pembangunan peningkatan kesadaran penerangan dari jawatan Agama sesuai dengan kondisi daerah tersebut.

Masyarakat Kecamatan Sesean pada umumnya memeluk agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Agama Islam dan Agama Alukta (Hindu/Budha).

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pemeluk agama di Kecamatan Sesean dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

TABEL 5

PENDUDUK KECAMATAN SESEAN
MENURUT AGAMA YANG DI ANUT
DIPERINCI PER DESA/KELURAHAN
(TAHUN 1989)

No.	DESA/KELURAHAN	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Islam	Alukta	Jumlah
1.	Pangli Palawa'	2.545	716	213	19	3.493
2.	Bori' Parinding	3.259	1.273	4	326	4.652
3.	Sesean Matallo	2.246	854	-	342	3.442
4.	Sesean Sulpara'	1.844	-	-	1.381	3.225
5.	Sesean Landorundun	1.640	-	2	1.191	2.833
6.	Bangakungan	1.834	322	2	420	2.578
7.	To'yasa Akung	1.170	1.065	-	146	2.371
8.	Sa'dan Ballopasange	1.300	810	-	500	2.610
9.	Sa'dan Ulusalu	1.018	202	-	550	2.280
10.	Sa'dan Malimbong	2.802	102	70	524	3.498
11.	Sa'dan Matallo	2.808	576	35	330	3.709
12.	Balusu	1.960	430	150	219	2.759
13.	Lilikira'	629	971	10	484	2.095
14.	Palangi'	1.696	832	50	24	2.591
! J u m l a h		27.851	7.152	536	6.545	42.084

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesean Tahun 1990

Pembangunan prasarana berupa rumah-rumah ibadat masing-masing diusahakan oleh ummat beragama secara swadaya dan beberapa diantaranya mendapat bantuan pemerintah yang jumlahnya tercatat sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a. Gereja Kristen Protestan | 69 buah |
| b. Kristen Katholik | 36 buah |
| c. Mesjid/Mushallah | 2 buah |

3. P e n d i d i k a n

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Seperti diketahui bahwa kita sedang dalam pembangunan (sedang berkembang) yang sangat membutuhkan tenaga-tenaga terdidik disegala bidang.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan di Kantor Urusan Pendidikan di Kecamatan Sesean bahwa jumlah sarana pendidikan untuk Tahun 1987/1988 adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------|------------------------------|-------------|
| 3.1 TK | 1 buah, dengan jumlah murid | 35 orang |
| 3.2 SD | 44 buah, dengan jumlah murid | 9.596 orang |
| 3.3 SLTP | 6 buah, dengan jumlah murid | 2.571 orang |
| 3.4 SLTA | 1 buah, dengan jumlah murid | 440 orang |

Apabila diperhatikan data tersebut di atas menurut penulis masih perlu penambahan sarana pendidikan terutama sarana Taman Kanak-kanak (TK), sarana Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), melihat animo masyarakat kepada pendidikan. Namun masih ada sebagian masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan terutama yang berdiam di pedesaan atau daerah-daerah yang terpencil.

Bagaimana keadaan dan tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini :

TABEL 6

TINGKAT PENDIDIKAN DI WILAYAH KECAMATAN
SESEAN DIPERINCI MENURUT DESA/LURAH

No.	Desa/Kelurahan	TK	SD	SLTP	SLTA	PT	KET
1.	Pangli Palawa	20	685	283	100	54	-
2.	Sesean Matallo	-	376	176	46	31	-
3.	Bori' Parinding	5	567	189	57	45	-
4.	Sesean Sulwara	-	253	163	43	35	-
5.	Landerundu	-	246	135	36	16	-
6.	Sa'dan Matallo	-	326	183	84	67	-
7.	Sa'dan Malimbong	-	318	143	71	48	-
8.	Sa'dan Uusalu	-	287	156	26	15	-
9.	Ballopasange	-	256	87	18	9	-
10.	To'yasa Alung	-	426	120	25	16	-
11.	Bangakungan	-	487	83	26	18	-
12.	Palangi	-	521	185	48	49	-
13.	Lilikira	-	267	56	16	10	-
14.	Balusu	10	435	126	59	47	-
J U M L A H		45	5350	1814	622	434	-

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sesean, 1990.

Berdasarkan tabel di atas, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah pendidikan sangat penting bagi usaha-usaha pemerintahan di dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan di dalam rangka pembangunan yang digalakkan dewasa ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

C. Struktur dan Tata Kerja Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Terselenggaranya struktur tata hubungan kerja di dalam organisasi pemerintahan adalah untuk menciptakan ketertiban pelaksanaan tugas, untuk itu perlu adanya pembangian tugas dan tanggung jawab demikian juga pemanfaatan sumber-sumber dana dan daya yang tersedia.

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan/Sekretariat Wilayah Kecamatan Sesean berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 82 Tahun 1984 dan Surat Keputusan Nomor. 83 tahun 1984 dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

Adapun tata kerja Pemerintahan Wilayah Kecamatan Sesean meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang:

1. Pemerintahan
2. Keamanan dan ketertiban umum
3. Kesejahteraan rakyat
4. Pembinaan masyarakat
5. Perekonomian
6. Pembangunan masyarakat desa

7. Pemungutan pajak dan keuangan
8. Administrasi

Kegiatan tersebut merupakan wewenang dan tanggung jawab mutlak yang dilimpahkan kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang melaksanakannya, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan.



B A B IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kegiatan Camat Selaku Administrator Pemerintahan

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Camat merupakan penguasa tunggal di daerahnya yang bertugas untuk memelihara lancarnya roda pemerintahan, memelihara keamanan-keamanan dan ketertiban umum serta menjalankan tugas pemerintahan Daerah yang dibebankan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Selanjutnya Camat melakukan koordinasi antara jawatan-jawatan vertikal maupun horisontal/dinas-dinas daerah yang berada di wilayahnya serta mengawasi dan membimbing pemerintah desa yang ada di wilayah kekuasaannya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Camat disamping melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum juga melaksanakan tugas pemerintahan daerah.

Dalam urusan pemerintahan umum, Kepala Wilayah Kecamatan Sesean menempati salah satu posisi komando yang membentang dari pusat Departemen Dalam Negeri sampai kepada yang serendah-serendahnya yaitu Kepala Wilayah itu sendiri. Oleh karena wilayah negara Republik Indonesia dibagi atas dua tingkatan daerah, maka berarti yang diberi kekuasaan otonomi hanya dua tingkatan pula, yaitu Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Pejabat-pejabat yang menjadi kepala dari tiap-tiap tingkatan itu di samping sebagai

alat pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan juga sebagai Kepala Wilayah.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sesean pada tanggal 3 November 1990 maka Camat sebagai alat pemerintah Pusat yang ada di kecamatan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum bertugas dan berkewajiban untuk:

1. Mengurus ketertiban dan keamanan di wilayahnya
2. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah
3. Mengawasi jalannya pemerintah wilayah kecamatan
4. Menjalankan kewenangan umum yang termasuk bidang pemerintahan pusat.

Camat sebagai alat pemerintah Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan yang menduduki tempat pemusatan (Penguasa Tunggal) di Wilayahnya, maka dalam hal ini Kepala Wilayah Kecamatan Sesean sebagai koordinator atas unsur-unsur yang ada di Wilayahnya, maka sangat penting baginya untuk menerapkan peranan-peranan yang ada padanya terutama peranannya sebagai pemimpin di Wilayah Kecamatan itu.

Wilayah Kecamatan adalah merupakan bagian dari Wilayah kekuasaan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sebagai Daerah otonom. Dengan demikian maka Kecamatan Sesean adalah merupakan organ/bagian dari Kabupaten

Daerah Tingkat II Tana Toraja dengan kekuasaan pada tingkat Kecamatan adalah kekuasaan Wilayah Administratif.

Camat adalah merupakan wakil Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan, dengan kata lain Kepala Wilayah Kecamatan adalah pelaksana tugas-tugas pemerintahan Tingkat II, dengan demikian Camat mempunyai tugas untuk memimpin aparatnya dan segala kegiatan yang menjadi tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Camat sebagai Kepala Wilayah yang mempunyai kedudukan sebagai penguasa tunggal di Wilayah Kecamatan, dengan demikian bahwa tugas Kepala Wilayah Kecamatan Sesean selaku administrator Pemerintahan secara umum dapat diperinci sebagai berikut :

1. Memimpin menyelenggarakan pemerintahan wilayah Kecamatan,
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan,
3. Memegang kebijaksanaan politik politisional dalam rangka usaha memelihara keamanan, ketertiban umum dalam keadaan tertib sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II,

4. Melaksanakan tugas sebagai prajaksa,
5. Melaksanakan tugas-tugas dibidang pertahanan sipil,
6. Mengadakan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur-unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setempat untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan,
7. Bertanggung jawab atas pemungutan pajak yang dibebankan kepadanya,
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan,
9. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang-bidang tugasnya.

Disamping tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Wilayah Kecamatan Sesean juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara lancarnya roda pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, serta menjalankan tugas pemerintahan umum Pusat dan Daerah yang dibebankan kepadanya,
- b. Melakukan koordinasi antara jawatan-jawatan vertikal maupun horizontal di wilayahnya,
- c. Mengawasi membimbing dan membina pemerintahan desa di Wilayahnya menuju desa swasembada dan desa Pancasila,

- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara roda pemerintahan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat,
- e. Mengenai adat istiadat masyarakat umum, terutama ketentuan dalam masyarakat desa, mengatur dalam rumah tangganya sendiri dengan mengingat dan mengetahui setiap perkembangan di Daerahnya.

Dengan memperhatikan tugas-tugas tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti betapa pentingnya dan luasnya peranan kepala wilayah Kecamatan Sesean. Ia adalah stabilisator, inovator dan pelopor dalam masyarakat kearah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Stabilisator dapat diartikan sebagai suatu keadaan tertib, tenang, aman dan tidak sering mengalami rongrongan. Karena itu pemerintah sebagai stabilisator harus dapat menciptakan suatu keadaan yang tenang dan aman dalam masyarakat.

Demikian pula pemerintahan wilayah Kecamatan Sesean harus mamapu menjadi inovator dalam arti menempatkan dirinya sebagai sumber-sumber ide baru bagi para aparatnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Oleh karena itu Camat hendaknya tidak hanya bertindak sebagai pelaksana semata dari keputusan-keputusan politik yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tana Toraja, tetapi juga harus bertindak sebagai sumber ide, sumber saran dan pendapat tentang

keputusan-keputusan yang kiranya perlu diambil terutama yang berhubungan dengan pelayanan kepentingan masyarakat.

B. Peranan Camat Sebagai Koordinator

Di dalam penyusunan program pembangunan desa yang berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1981 Tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Desa, maka faktor keterpaduan ini sangat penting dengan berbagai instansi vertikal dan horizontal maupun sektoral serta lembaga sosial masyarakat dengan bimbingan dari Camat, dibantu oleh Kepala Urusan Pengembangan Desa tingkat Kecamatan.

Keterpaduan gerak antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait menghendaki anggota masyarakat dapat memberikan partisipasinya dalam program pembangunan desa. Oleh karena itu diperlukan kerja sama aparat pemerintah ditingkat Kecamatan dengan instansi vertikal dan horizontal dalam menangani berbagai sektor pembangunan desa.

1. Hubungan kerja Kepala Wilayah Kecamatan Sesean dengan Instansi-instansi vertikal.

- 1.1. Hubungan dengan Jawatan Penerangan.

Camat sebagai administrator pemerintahan di wilayah Kecamatan merupakan pejabat tertinggi di bidang pemerintahan, dengan demikian Camat berke-wajiban memimpin dan memelihara jalannya roda pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut,

Kepala Wilayah Kecamatan Sesean mempunyai hubungan kerja dengan Jawatan penerangan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat luas, mengumpulkan hal-hal yang perlu dipublikasikan, menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah, menghimpun, menganalisa, dan mengirim informasi untuk disebar luaskan melalui media massa mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

1.2. Hubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala Wilayah Kecamatan Sesean dalam kedudukannya selaku administrator pemerintahan harus mengetahui segala kejadian yang terjadi didalam Wilayah Kecamatan termasuk bidang keamanan. Karena itu dalam pelaksanaan tugas Camat untuk mengetahui kejadian atau kegiatan dibidang keagamaan tidak bisa terlepas dari Kantor urusan agama sebagai salah satu instansi yang mempunyai tugas khusus di bidang agama. Sebaliknya pelaksanaan tugas dari instansi tersebut harus sepengetahuan Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Sesean.

1.3. Hubungan dengan Kantor Pendidikan dan Kedudukan Kecamatan Sesean.

Camat dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Camat harus melakukan hubungan dengan kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, hal ini disebabkan karena kedua aparat pemerintah tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Camat dalam usahanya untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di wilayah tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa pengetahuan Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah Kecamatan.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sesean yaitu Bapak MS.Parapak mengatakan bahwa dalam kegiatan dan tugasnya membantu Camat di Kecamatan Sesean dalam dibidang pendidikan masyarakat dan pengembangan kebudayaan melakukan usaha-usaha seperti:

- Membina dan mengurus Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Kewajiban Belajar,
- Membina dan mengurus pendidikan masyarakat, serta pemberantasan buta huruf,
- Membina dan mengurus pembinaan generasi muda dan keolahragaan,
- Membina dan meningkatkan pengembangan ke-

budayaan. Suatu hal yang dirasakan sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan adalah mengenai pendidikan formal dan pendidikan formal itu sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah, di samping itu pemerintah Wilayah Kecamatan Sesean menganggap perlunya melaksanakan pendidikan non formal dengan maksud memberikan peluang kepada masyarakat yang belum pernah mendapatkan pendidikan untuk mendapatkan pengajaran adalah dengan jalan melaksanakan kegiatan pelaksanaan buta huruf.

Dalam pelaksanaannya Camat, dalam arti pemerintah Wilayah Kecamatan Sesean bekerja sama dengan Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Keterlibatan instansi tersebut adalah menyediakan tenaga pengajar dan buku paket seperti yang nampak pada tabel berikut ini:

TABEL 7

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERANTASAN
BUTA HURUF DIPERINCI MENURUT DESA/
KELURAHAN DI KECAMATAN SESEAN
(TAHUN 1985-1989)

NO. ! Desa/Kelurahan	J U M L A H				
	Kegiatan	Pengajar	Peserta	Buku Pkt	Ket
1. ! Pangli Palawa'	! 10	! 30	! 100	! 15	! -
2. ! Bori' Parinding	! 34	! 42	! 400	! 18	! -
3. ! Sesean Matallo	! 20	! 45	! 308	! 11	! -
4. ! Sesean Sulbara'	! 45	! 58	! 448	! 11	! -
5. ! Sesean Landorundun'	! 32	! 36	! 320	! 20	! -
6. ! To'yasa Akung	! 15	! 30	! 271	! 20	! -
7. ! Sangakungan	! 30	! 21	! 300	! 10	! -
8. ! Ballo Pasange'	! 10	! 22	! 223	! 10	! -
9. ! Sa'dan Ulusalung	! 30	! 34	! 300	! 20	! -
10 ! Sa'dan Malimbong	! 26	! 29	! 261	! 35	! -
11 ! Sa'dan Matallo	! 40	! 28	! 400	! 37	! -
12 ! B a l u s u	! 33	! 40	! 337	! 23	! -
13 ! L i l i k i r a'	! -	! -	! -	! -	! -
14 ! P a l a n g i'	! -	! -	! -	! -	! -
! J u m l a h	! 325	! 414	! 3468	! 230	! -

Sumber data : Kantor Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan.



Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Sesean di ketahui bahwa masih ada yang belum pernah mendapat pelaksanaan kegiatan pemberantasan buta huruf selama dilaksanakan di Kecamatan Sesean ini, dengan program ini dilakukan oleh Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten daerah Tingkat I.

Namun disini tidak berarti bahwa desa tersebut tidak dikena program hingga sekarang, tetapi baru akan diprioritaskan pada tahun 1991.

Dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Sesean yang masih buta huruf dengan yang sudah dapat membaca, maka kegiatan semacam ini harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

1.4. Hubungan dengan Sektor Kepolisian (Polsek) dan Koramil Kecamatan Sesean. Dalam kegiatan fungsi Camat dibidang penga-manan yaitu pembinaan, ketenteraman dan ketertiban wilayah, pihak aparat pemerintah wilayah Kecamatan bekerjasama dengan pihak aparat penegak hukum seperti; sektor kepolisian dan Koramil untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, mengamankan kebijaksanaan pemerintah daerah. Sektor Kepolisian dalam kegiatannya dengan kegiatan fungsi Camat tersebut juga membantu dalam mengawasi dan mengatasi peristiwa-peristiwa yang menyangkut atau mengarah

kepada tindakan kriminal, juga membantu Camat dalam mengamankan harta milik Negara.

Koramil di samping membantu Camat dalam bidang keamanan seperti halnya dengan sektor kepolisian. Juga membantu Camat dalam tugasnya dibidang politik utamanya dibidang pembinaan ideologi negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Koramil melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat dan melaporkannya kepada Camat apabila ada kegiatan tersebut yang menyimpang dari undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap anggota masyarakat yang terlibat subversi utamanya terhadap anggota ABRI. Tabel berikut ini adalah data peristiwa yang terjadi di Wilayah Kecamatan Sesean yang penulis dapatkan di Kantor Polsek dan Koramil.

TABEL 8

PERISTIWA YANG TERJADI DI
WILAYAH KECAMATAN SESEAN
(TAHUN 1989)

No.	JENIS PERISTIWA	BANYAKNYA	JUMLAH (Rp)	KET.
1	Pencurian/Pembongkaran	2	2.500.000	-
2	Persinahan	3	-	-
3	Pengrusakan Barang	2	96.000	-
4	Penganiayaan	8	-	-
5	Kecelakaan Lain	3	-	-
6	Pembunuhan	1	-	-
7	Kebakaran	1	46.000.000	-
8	Penghinaan	3	-	-
Jumlah		23	66.596.000	-

Sumber data : Kantor Polsek dan Koramil Kecamatan Sesean
Tahun 1990.

2. Hubungan Kerja Kepala Wilayah Kecamatan Dengan Dinas Daerah.

2.1. Hubungan dengan Dinas Kesehatan.

Di dalam pelaksanaan fungsi Camat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan bekerja sama dengan aparat pemerintah dari Dinas Kesehatan yang ada diwilayahnya.

Dalam pelaksanaan fungsi Camat tersebut, Dinas Kesehatan Kecamatan Sesean membantu untuk

mengusahakan meningkatkan sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan Sesean seperti Putu, Posyandu, Sumur Gali, jamban keluarga dan lain-lain, di samping itu dinas kesehatan juga memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat melalui kader dan kursus seperti; kader gizi, kader LKMD, khusus dokter kecil yang terbagi atas dua yaitu dokter kecil proyek (yang dibiayai oleh Dinas Kesehatan) dan kursus dokter kecil yang bukan proyek yaitu yang merupakan swadaya masyarakat.

Selain tugas tersebut di atas, Dinas Kesehatan Kecamatan juga melaksanakan tugas untuk mengadakan pemberantasan penyakit, wabah, melakukan pengobatan, Keluarga Berencana serta penelitian terhadap penyakit menular yang pada pokoknya mengarah kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mengetahui perkembangan sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan Sesean dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 9
PERKEMBANGAN SARANA KESEHATAN DI
WILAYAH KECAMATAN SESEAN
(TAHUN 1989)

No.!	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KET.
1 !	Posyandu	11	-
2 !	P u s t u	5	-
3 !	Jamban Keluarga	5.177	-
4 !	Air sumur gali	2.841	-
5 !	Kelompok tanam gizi	179	-
6 !	MCK Umum yang dikelola PKK	-	-
! J u m l a h		8.226	-

Sumber data : Kantor Dinas Kecamatan Sesean Tahun 1990.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan masih perlu mendapat perhatian oleh pemerintah utamanya sarana Posyandu dan Pustu dan sarana kesehatan lainnya.

2.2. Hubungan dengan Dinas Pertanian.

Kepala Wilayah Kecamatan Sesean di dalam usahanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayahnya sangat erat kaitannya dengan aparat pemerintah dari Dinas Pertanian, mengingat

penduduk wilayah Kecamatan Sesean pada umumnya adalah petani.

Dalam kaitannya dalam pelaksanaan tugas Camat tersebut, Dinas Pertanian Kecamatan Sesean melakukan usaha di bidang penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan terhadap para petani dipedesaan, penyediaan sarana untuk menunjang peningkatan produksi seperti: bibit, pupuk, racun dan lain-lain yang merupakan kebutuhan untuk para petani.

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka Dinas Pertanian Kecamatan Sesean untuk bertugas ditiap-tiap desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sesean untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan secara kontinyu kepada masyarakat.

Dinas Pertanian tersebut mengadakan penyuluhan-penyuluhan melalui penataran dan pemutaran film, musyawarah, demonstrasi alat, pemupukan berimbang dan lain-lain serta penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Pertanian Kecamatan menyediakan sarana untuk menunjang peningkatan produksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 10
 REALISASI PENYULUHAN SAPRODI DI
 WILAYAH KECAMATAN SESEAN
 (TAHUN 1989)

No.	JENIS SARANA	JUMLAH/TON	KETERANGAN
1.	Benih/bibit	105	-
2.	P u p u k	300	-
3.	R a c u n	25	-
! J U M L A H		430	-

Sumber data : Dinas Pertanian Kecamatan Sesean
 Tahun 1990

2.3 Hubungan dengan Dinas Kehutanan

Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di wilayahnya, berarti bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi. Mengingat Wilayah Kecamatan Sesean sebagian daerahnya terdiri atas hutan, maka untuk menjaga kelestarian dan keamanan hutan tersebut, pihak aparat pemerintah wilayah kecamatan bekerja sama dengan aparat pemerintah dari Dinas Kehutanan yang ada diwilayahnya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Camat bersama dengan aparat Dinas Kehutanan yang ada di Kecamatan, melakukan pengontrolan langsung terhadap aparat Dinas Kehutanan lainnya yang

ada di desa-desa yang tersebut dengan PHPA yang berjumlah 14 orang dan tersebar di wilayah Kecamatan Sesean, petugas inilah yang langsung ke masyarakat.

Khusus pelaksanaan reboisasi hutan di wilayah Kecamatan Sesean, hanya dilakukan pada Pelita ke-2 tahun 1974-1976 dengan luas areal 2.250 Ha dan jenis tanaman pada kayu adalah pinus.

Jenis hutan dan luasnya yang ada di wilayah Kecamatan Sesean dapat dilihat pada tabel skripsi berikut ini:

TABEL 11
JENIS HUTAN YANG ADA
DI WILAYAH KECAMATAN SESAN

No.	JENIS HUTAN	JUMLAH (Ha)	KETERANGAN
1.	Hutan suaka alam	967	-
2.	Hutan wisata	750	-
3.	Hutan lindung	-	-
4.	Hutan produksi	-	-
	! - Terbatas	!	!
	! - B i a s a	!	!
! J u m l a h		!	!
		1.717	-

Sumber data: Dinas Pertanian Kecamatan Sesean Tahun 1990

2.4. Hubungannya dengan Dinas Peternakan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Camat dibidang kesejahteraan masyarakat. dinas Peternakan Kecamatan Sesean melaksanakan usaha seperti, melaksanakan penyuluhan kepada petani ternak tentang cara beternak yang baik, misalnya pembuatan kandang, dan pemberian makanan, melaksanakan vaksinasi terhadap penyakit hewan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun mengajak petani ternak untuk mengenal inseminasi buatan (IB), seperti pada tahun 1979 dilaksanakan di tiap-tiap Desa/kelurahan dan hasilnya cukup memuaskan bagi masyarakat petani ternak.

Dengan demikian Dinas peternakan mengajak petani ternak untuk mengenal teknologi maju. di bidang peternakan seperti pengawetan jerami untuk makanan ternak, pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas yang dapat dipergunakan untuk keperluan memasak dalam penyediaan makanan ternak Dinas peternakan Kecamatan Sesean, memberikan bibit hijauan kepada petani ternak di tiap-tiap desa/kelurahan, misalnya bibit rumput gajah, lontorogun dan gamal, untuk penyediaan penyebaran bibit ternak, pengadaan pejantan untuk hewan yang mempunyai keturunan yang baik di tiap-tiap desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 12
PENYEBARAN BIBIT TERNAK DI WILAYAH
KECAMATAN SESEAN (TAHUN 1986-1989)

No. !	JENIS TERNAK	J U M L A H	KETERANGAN
1. !	K e r b a u	175	-
2. !	B a b i	2.216	-
3. !	A y a m	843	-
4. !	S a p i	29	-
5. !	K a m b i n g	7	-
! !	J u m l a h	3.270	-

Sumber Data: Dinas Peternakan Kecamatan Sesean Tahun 1990

Hubungan-hubungan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Wilayah Kecamatan dengan aparat dari Instansi-instansi vertikal dan horizontal, dapatlah diketahui betapa pentingnya dan erat kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak Camat tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa bantuan dari instansi-instansi yang ada di wilayahnya dan di pihak lain instansi-instansi tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa sepengetahuan Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah seperti yang dikemukakan dalam U.U. No. 5 Tahun 1947. Adapaun pelaksanaan hubungan kerja antara Kepala Wilayah



Kecamatan Sesean dengan instansi-instansi vertikal dan horizontal dalam rangka pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan, sudah mendapat tanggapan baik dari para aparat bawahan dan aparat instansi-instansi vertikal dan horizontal dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 13
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP
HUBUNGAN KERJA CAMAT DAN
INSTANSI VERTIKAL DI KECAMATAN SESEAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase	Ket.
1.	Sangat baik	24	20 %	-
2.	Baik	7	50 %	-
3.	Cukup baik	5	30 %	-
4.	Kurang baik	-	-	-
5.	Tidak baik	-	-	-
6.	Tidak menjawab	-	-	-
! J u m l a h		36	100 %	-

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 1990

Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan dalam hubungannya dengan instansi-instansi horizontal yang ada di Wilayah Kecamatan Sesean dapat dikemukakan pada tabel berikut ini

TABEL 14
TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP HUBUNGAN
KERJA CAMAT DENGAN DINAS-DINAS DAERAH.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase	Ket.
1.	Sangat baik	3	17 %	-
2.	B a i k	7	45 %	-
3.	Cukup baik	6	28 %	-
4.	Kurang baik	-	-	-
5.	Tidak baik	-	-	-
6.	Tidak menjawab	2	15 %	-
! J u m l a h		18	100 %	-

Sumber Data: Hasil Wawancara Penulis Tahun 1990

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Kepala Wilayah Kecamatan dengan instansi-instansi vertikal dan horizontal dalam menjalankan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Sesean pada dasarnya sudah berjalan dengan baik.

TABEL 15

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN
CAMAT SELAKU ADMINISTRATOR DI KECAMATAN SESEAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentasi(%)	Keterangan
1	Sering sekali	7	35	-
2	Sering-sering	10	50	-
3	Sering	3	15	-
4	Tidak sering	-	-	-
5	Tidak menjawab	-	-	-
	Jumlah	20	100	-

Sumber Data : Hasil wawancara penulis 1990

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa kegiatan-kegiatan Camat selaku Administrator di Kecamatan Sesean cukup menggembirakan, dan memang kegiatan-kegiatan Camat selaku Administrator sangat dibutuhkan di dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan peningkatan pembangunan di segala bidang.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pelaksanaan Peranan Camat Selaku administrator Pemerintahan.

1. Faktor Pendidikan Masyarakat.

Pendidikan adalah merupakan faktor yang sangat penting karena maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Dengan demikian untuk memajukan tingkat kecerdasan masyarakat khususnya di Kecamatan Sesean yang masih terbelakang

pendidikannya diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan yang berupa sarana dan prasarana pendidikan.

Karena pendidikan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat membutuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada hasil penelitian berdasarkan tanggapan masyarakat tentang pendidikan sebagai berikut:

TABEL 16

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN
MASYARAKAT DI KECAMATN SESEAN

No.	Jawaban Masyarakat	Jumlah	prosentasi	Ket
1.	Baik	2	10 %	-
2.	Sedang	5	25 %	-
3.	Rendah	9	45 %	-
4.	Tidak menjawab	4	20 %	-
! J u m l a h		20	100 %	-

Sumber Data: Hasil Wawancara Tahun 1990.

Sesuai dengan data di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Sesean masih sangat rendah yaitu garang (45%) dari 20 orang yang telah di wawancarai. Berdasarkan data tersebut diatas, maka tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Sesean Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja, masih tergolong sangat rendah di bandingkan dengan Daerah-daerah lain dengan adanya pendidikan yang masih rendah di wilayah Kecamatan Sesean ini jelas sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan peranan Camat selaku Adminsitrator di Kecamatan Sesean tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara penulis dengan aparat Kecamatan, dan Desa/kelurahan tentang tingkat pendidikan dalam wilayah Kecamatan Sesean adalah sebagai berikut:

TABEL 17

TINGKAT PENDIDIKAN APARAT
KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN
DALAM WILAYAH KECAMATAN SESEAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentasi(%)	Ket.
1	S D	7	35	-
2	S M P	9	45	-
3	S M A	3	15	-
4	SARJANA	1	5	-
Jumlah		20	100	-

Sumber data : Hasil wawancara penulis 1990

Dari penelitian tersebut diatas, maka dapatlah kita ketahui bahwa tingkat pendidikan aparat Kecamatan dan Desa/kelurahan masih sangat perlu ditingkatkan dengan rendahnya pendidikan aparat wilayah Kecamatan ini merupakan faktor yang turut mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Camat selaku Adminsitrator pemerintahan. Demikian pula dengan rendahnya tingkat pendidikan di daerah ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah. Usaha tersebut perlu menjangkau pula kelompok masyarakat yang karena kurang mampu, cacat, ataupun bertempat tinggal di daerah terpencil kurang dapat memanfaatkan pendidikan yang tersedia agar mereka pun mendapat kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan.

Demikian pula perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak yang berbakat istimewa agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal . Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas mutu dan efesiensi kerja. Dalam hubungan ini berbagai tingkat dan jenis pendidikan

serta latihan keguruan dan politeknik dalam rangka mempercepat dipenuhinya kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil bagi kebutuhan pembangunan di berbagai bidang.

Perlu diketahui bahwa faktor pendidikan termasuk di dalamnya pengalaman kerja merupakan dasar untuk memperoleh tenaga-tenaga yang terampil dan cakap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan masih sangat kurang. Oleh sebab itu dalam penerimaan pegawai baru diperlukan dan diperhitungkan dari calon pegawai tersebut, hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai. Seperti halnya dengan pengangkatan seorang Camat dan aparatnya persyaratan-persyaratan dapat diperhatikan terutama faktor pendidikannya sehingga nantinya dapat menggerakkan masyarakat terutama menggerakkan dalam rangka mengikutsertakan dalam kegiatan pembangunan.

2. Faktor Kemampuan Pelaksana.

Kemampuan perangkat aparatur pemerintahan pada dasarnya memegang peranan penting dalam manajemen pemerintahan yang secara langsung mengenai tugas-tugas yang bersifat operasional maupun administratif.

Camat sebagai manajer tingkat menengah adalah merupakan penghubung kebijaksanaan pimpinan tingkat atas untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan desa

oleh karena itu kemampuan Camat dibidang administratif dituntut lebih besar daripada kemampuannya dibidang teknis.

Aparat pemerintahan Kecamatan maupun bawahannya sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan Desa dituntut suatu kemampuan konsekual yaitu harus mengetahui berbagai ketentuan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah atasannya yang menyangkut bidang pemerintahan dan pembangunan, maka dengan demikian kemampuan di bidang tersebut, maka segala penerapan kebijaksanaan pemerintah akan dapat dijabarkan dalam program perencanaan dan pengelolaan dana, sarana fungsional, laporan serta analisa akhir kegiatan proyek-proyek pembangunan desa.

Kemampuan terhadap analisa tentang manfaat pembangunan sarana dan prasarana bagi kebutuhan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan konsep-konsep yang dikembangkan dan mencapai sarana sebagaimana yang ditetapkan dalam program pemerintah. Tuntunan pekerjaan administrasi maupun operasional pembangunan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sudah jelas diperlukan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah Kecamatan dan unit-unit dalam menangani tugas-tugas tersebut.

Untuk pelaksanaan tugas-tugas yang diemban terutama dalam mengatasi berbagai hambatan dalam pem-

bangunan desa, maka diperlukan aparat pemerintah kecamatan disamping sehat fisik dan mental juga memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut seperti :

- a. Adanya kecakapan teoritis dan praktis terhadap bidang tugas dan pekerjaan,
- b. Cukup memiliki dasar-dasar pengetahuan dalam bidang pemerintahan,
- c. Berpikir secara sistimatis dan praktis,
- d. Memiliki pertimbangan yang rasional, praktis dan dinamis,
- e. Penuh dedikasi dan pengabdian,
- f. Inisiatif, tekun jujur dan bertanggungjawab.

Dari berbagai persyaratan tersebut kiranya dapat dipahami sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan langsung. Sebagai aparat pemerintahan di tingkat Kecamatan harus menyadari hakekat dan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dan perlu di pupuk kerjasama yang serasi dan harmonis. Dengan demikian aparat pemerintah Kecamatan disamping sehat fisik dan mental juga di tuntutan tingkat pendidikan yang memadai sehingga mampu melaksanakan menunjang tugas-tugas Camat.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan bersama aparatnya pada tgl. 5 Nopember 1990

dikemukakan bahwa, tujuan dari pada pembangunan desa adalah merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hal ini memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, bukan saja sebagai obyek pembangunan tetapi justru untuk ikut serta secara aktif sebagai subyek pembangunan.

Masyarakat sebagai obyek, berarti masyarakat menjadi sasaran pembangunan sehingga lebih bersifat pasif sedangkan sebagai subyek baik sebagai perencana, pelaksana juga ikut bertanggungjawab atas keberhasilan pembangunan itu.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa tenaga, uang, material serta sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam berbagai kegiatan. Masalah partisipasi masyarakat adalah menyangkut sikap mental dengan demikian penggerakkan partisipasi masyarakat terhadap usaha pembangunan berarti harus menyadarkan mereka tentang maksud suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kecamatan.

D. Masalah-masalah Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Selaku Administrator Pemerintahan.

Sekalipun Pelaksanaan fungsi Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun masih sering ditemukan masalah-

masalah yang menyebabkan fungsi Camat tidak secara efisien dan efektif.

Adapun masalah-masalah yang sering dijumpai dalam pelaksanaan fungsi Camat adalah :

1. Kurang difungsikannya kedudukan Camat sebagai kepala dan koordinator wilayah. Camat dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah adalah penguasa tunggal didaerahnya dengan demikian baginya harus mengetahui segala apa yang terjadi dilingkungan kerjanya. Namun dalam kenyataan biasanya Pemerintah Kabupaten dan instansi-instansi vertikal sering langsung ke desa tanpa sepengetahuan Camat. Setelah mendapat hambatan barulah mereka melapor kepada Camat.
2. Kesadaran masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan, kesadaran masyarakat sangat diharapkan karena dengan adanya hal ini maka mereka dapat berpartisipasi dengan baik. Masyarakat Kecamatan Sesean walaupun telah memberikan partisipasinya dengan baik, namun disisi lain mereka belum menyadarinya, walaupun sebenarnya merupakan kebaikannya sendiri. Sebagai contoh, penggunaan teknologi pertanian yang merupakan program nasional dibidang pertanian setempat tetap saja mengusahakannya agar supaya masyarakat dalam hal

ini petani pada akhirnya mau menerimanya.

Dalam hal ini di Kecamatan Sesean kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa karena aparat pelaksana kurang dapat menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut, demikian pula masyarakat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah karena masyarakat ingin terlebih dahulu melihat hasil dari pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Bagaimana kondisi kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam hal pembaharuan dan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 18

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PARTISIPASI/KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SESEAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase
1.	Sering sekali	5	25 %
2.	Sering-sering	2	10 %
3.	Jarang	9	45 %
4.	Tidak pernah	-	-
5.	Tidak menjawab	3	20 %
! J u m l a h		19	100 %

Sumber Data: Hasil wawancara penulis tahun 1990

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapatlah kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam berbagai pembangunan di Wilayah Kecamatan Sesean masih sangat rendah. Dengan masih rendahnya partisipasi/kesadaran masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan, merupakan suatu kendala yang dihadapi Camat dalam melaksanakan fungsinya selaku administrator pemerintahan.

3. Kemampuan Aparat Bawahan Dalam Membantu Camat.

Manusia sebagai tenaga pelaksana dalam setiap organisasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Namun demikian justru pada faktor manusia inilah yang sering untuk mencapai tujuan.

Tenaga pelaksana baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif harus sesuai dengan tugas-tugas organisasi yang akan dilaksanakan.

Camat beserta aparatnya di wilayahnya Kecamatan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat dapat diketahui oleh aparat masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Sesean Camat beserta aparatnya memegang peranan yang sangat penting. Kepala Wilayah

Kecamatan Sesean dalam hal ini Camat masih merasakan kurangnya kemampuan aparat bawahannya dalam membantu melaksanakan fungsinya selama ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Wilayah Kecamatan Sesean pada tanggal 3 Nopember 1990 yang menyangkut kemampuan aparat bawahannya, diperoleh keterangan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Camat adalah aparat bawahan kurang mampunya menjabarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh Camat.

E. Mengatasi Masalah-masalah Yang Menghambat Camat Selaku Administrator Pemerintahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam menjalankan suatu tugas atau fungsi kita tidak dapat terhindar dari suatu permasalahan atau hambatan untuk mencapai sasaran.

Seperti halnya dengan Camat, di dalam menjalankan fungsinya banyak menemui permasalahan permasalahan yang menjadi faktor penghambat, oleh karena itu baginya dituntut untuk memiliki kemampuan atau keterampilan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut baik itu kemampuan atau keterampilan teoritis maupun operasional. Hal ini sangat penting baginya demi untuk kelancaran dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kepala Wilayah Kecamatan Sesean dalam hal ini Camat di dalam menjalankan fungsinya banyak menemui masalah-masalah yang memerlukan pemecahan yang sungguh-sungguh. Sebagai langkah pemecahan dari masalah-masalah tersebut Camat telah menentukan beberapa kebijaksanaan. Camat dalam mengatasi masalah pelampauan wewenang yang sering dilakukan oleh aparat daerah, maka Camat telah menegaskan/menginstruksikan pada aparat bawahannya yang ada di desa/kelurahan untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Camat bila hal seperti ini terjadi.

Berdasarkan tanggapan responden tentang kebijaksanaan Camat dalam menginstruksikan/penegasan pada aparat bawahannya yang ada di Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :

TABEL 19

**TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEBIJAKSANAAN CAMAT
DALAM MENGINSTRUKSIKAN/PENEGASAN
PADA APARAT DESA/KELURAHAN**

No.	Jawaban Responden!	Jumlah	Prosentasi!	Ket.
1.	Sangat baik	3	15	-
2.	B a i k	9	45	-
3.	Cukup baik	7	35	-
4.	Kurang baik	-	-	-
5.	Tidak baik	-	-	-
6.	Tidak menjawab	1	5	-
J U M L A H		20	100	

Sumber data: Wawancara penulis Tahun 1990

Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa responden tersebut cukup baik ke-

bijaksanaan Kepala Wilayah Kecamatan dalam mengatasi masalah-masalah yang menghambat camat selaku administrator pemerintahan.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membantu pelaksanaan fungsi Camat, maka Camat Kecamatan Sesean mengadakan pendekatan individu; hal ini dimaksud agar supaya Camat dapat secara langsung menjelaskan tujuan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat, sehingga Camat beserta aparatnya akan mendapatkan informasi baik itu berupa keluhan-keluhan atau laporan yang dapat menjadi masukan yang perlu mendapat perhatian atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai contoh adanya laporan masyarakat tentang penjualan pupuk oleh pengecer yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Camat merasa perlu mengadakan pertemuan/rapat untuk membahas masalah ini dengan mengundang instansi-instansi yang terkait, para Kepala Desa dan tokoh masyarakat serta para pengecer pupuk yang ada di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar aparat pemerintah Kecamatan dapat melakukan pengawasan dengan baik.

Perkembangan pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah tidak akan ada hentinya karena sepanjang masa mengikuti derap perkembangan masyarakat. Perkembangan tersebut akan menimbulkan tugas-tugas baru bagi perangkat

pemerintah yang ada didaerah, diantaranya Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan. Adalah suatu kenyataan bahwa tugas Camat tidak saja terdapat di dalam peraturan Departemen Dalam Negeri, melainkan tersebar berbagai peraturan perundang-undangan misalnya pertanian, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Tugas Camat yang demikian membawanya ke posisi sebagai koordinator di wilayahnya, secara singkat ditentukan sebagai penguasa tunggal dibidang pemerintahan. Sebagai akibatnya maka fungsi Camat sulit untuk diperinci karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan dan kemajuan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi Camat di Kecamatan Sesean sebagai administrator pemerintahan yang juga sebagai koordinator di wilayahnya sudah berjalan dengan baik hal ini didasarkan atas pengamatan penulis selama penelitian.

Camat dalam pelaksanaan fungsinya lebih banyak mengadakan peninjauan langsung dilapangan untuk mengamati aparat bawahannya di desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu juga Camat memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang dihadapi.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang aparat pemerintah Kecamatan pada tanggal 7 November 1990 diperoleh keterangan bahwa masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh masyarakat adalah yang menyangkut per-

tanahan. Namun dengan cara yang dilakukan Camat yaitu mengadakan bimbingan dengan masyarakat masalah-masalah tersebut lebih banyak diselesaikan hanya pada tingkat Kecamatan. Sedangkan yang menyangkut pelaksanaan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal dan horizontal, selain dilaksanakan secara formal yaitu melalui rapat/pertemuan yang dilakukan secara non formal yaitu dengan mengadakan konsultasi secara langsung dengan jalan saling mengunjungi.

Tentang pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan yang juga menyangkut pelaksanaan koordinasi terhadap instansi vertikal dan horizontal di Kecamatan Sesean telah mendapat tanggapan baik dari aparat bawahan maupun dari instansi vertikal dan horizontal dapat dikemukakan pada tabel berikut ini

TABEL 20

TANGGAPAN ATAS PELAKSANAAN FUNGSI
CAMAT DI KECAMATAN SESEAN

No.	! Kategori Penilaian !	Tanggapan ! Responden	
		R	! Prosentase
1.	! E f e k t i f !	12	! 75
2.	! Cukup efektif !	8	! 25
3.	! Tidak efektif !	-	! -
4.	! Kurang efektif !	-	! -
5.	! Tidak memberi pe- ! nilai !	-	! -
J u m l a h		20	! 100

Sumber Data: Hasil Wawancara Penulis Tahun 1990

Dari data tersebut di atas nampak bahwa responden yang menjawab efektif sejumlah 12 responden (75%), cukup efektif sejumlah 8 responden (25%). Dari penilaian responden tersebut didasarkan atas seringnya Camat melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengawasi aparat bawahannya di Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian baginya mudah mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh aparat bawahannya.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat dibidang pemerintahan meliputi:

1. Menertibkan berbagai ketentuan perundang-undang dan

kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II,

2. Mengawasi dan membimbing aparat dalam mengumpulkan dan menyusun data monografi,
3. Melakukan penertiban dibidang pertahanan,
4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,
5. Mengkaji dan meneliti laporan pelaksanaan pemerintahan Wilayah Kecamatan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Camat terhadap aparat bawahannya adalah bermaksud unuk lebih banyak terjun langsung kelapangan untuk melihat para aparat bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas tentunya akan dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang kebijaksanaan Camat dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan fungsinya sebagai administrator pemerintahan utamanya yang menyangkut pembinaan masyarakat, dapat dikemukakan pada tabel berikut ini:



TABEL 21
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEBIJAKSANAAN
CAMAT DALAM MENGADAKAN PEMBINAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN SESEAN

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sangat memuaskan	3	9
2.	Memuaskan	9	46
3.	Cukup memuaskan	7	35
4.	Kurang memuaskan	-	-
5.	Tidak memuaskan	-	-
6.	tidak menjawab	3	15
! J u m l a h		25	100 %

Sumber Data: Hasil Wawancara Penulis Tahun 1990.

Dari tabel tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa responden yang menjawab sangat memuaskan hanya 3 responden (9%), yang menjawab memuaskan sejumlah 9 responden (46%), dan yang menjawab cukup memuaskan sejumlah 7 responden (35%), sedangkan yang tidak memberikan jawabannya sejumlah 3 responden (15%).

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di kemukakan pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Camat sebagai administrator Pemerintahan di Kecamatan Sesean pada dasarnya telah terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan.
2. Hubungan kerja antara Kepala Wilayah Kecamatan dengan-Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat selaku administrator pemerintahan di Kecamatan Sesean sudah berjalan dengan baik.
3. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan adalah faktor kepemimpinan, kemampuan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat.
4. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesean karena adanya pelampauan wewenang dari Daerah terhadap Kepala Wilayah Kecamatan, karena-kurangnya kesadaran masyarakat dan kemampuan aparat bawahan.

B. Saran-Saran

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar supaya kegiatan Camat selaku administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesean dapat mencapai daya guna dan hasil yang lebih tinggi, maka disarankan kepada Camat untuk lebih efektif meningkatkan kemampuannya baik di bidang administrasi maupun di bidang operasional.
2. Untuk hubungan kerja di Wilayah Kecamatan antara Kepala Kecamatan dengan Instansi-instansi Vertikal dan Horizontal dalam pelaksanaan fungsi Camat sebagai administrator pemerintahan yang lebih baik di Wilayah-Kecamatan Sesean maka disarankan agar lebih meningkatkan pelaksanaan rapat koordinasi untuk membicarakan hal-hal yang penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi Camat dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sesean disarankan agar supaya Camat dapat mengadakan pendekatan individu terhadap masyarakat serta memberikan kesempatan kepada aparat bawahannya untuk mengikuti kursus-kursus, latihan-latihan, penataran-penataran dan lain-lain yang dapat menambah pengetahuannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Gaus, John M., 1986. Masalah Organisasi.
- Hadiatmo Sarwono, 1965. Himpunan Peraturan-peraturan Tentang Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pancuran Utama, Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno, Drs. 1986 Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung Jakarta.
- Jumari, Ismanto, 1980. Peranan Wanita Dalam Pembangunan. Semarang.
- Kansil, T.S.C., Drs., SH. 1982. Peraturan Tata Pemerintahan Indonesia, Paradnya Paramita, Jakarta.
----- 1978. Sistem Pemerintahan.
- Kartasapoetra, R.G., SH & Misdianti Dra. 1990. Peranan-Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koonts, H. & O'Donnel, 1983. Managament.
- Manullang, M. Drs. 1973. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah, Pembangunan, Jakarta.
- Musanef, Drs. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Orakoso, Djoko, SH. 1984. Kedudukan Dan Fungsi Kepala - Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Di Derah, Ghalia Indonesia.
- Pamudji, S. Prof. Drs., MPA. 1985. Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
- Saparin, Sumber, 1979. Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwono Handayaniingrat, Drs. Dan Hindratmo, R. 1982. Lan-dasan Dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah. Kota Dan Desa, Bina Aksara, Jakarta.

- Soejito, Irawan, 1984. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Siagian, SP, MPA. Dr., 1970. Filsafat Administrasi, Jakarta.
- Sujamto, 1984. Otonom Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab, Chalia Indonesia.
- Sunindhia, Y.W., 1987. Peraktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
- Surianingrat, Bayu, Drs. 1976. Wewenang Tugas Dan Kewajiban Camat, Bina Aksara, Jakarta.
- Syafruddin, Ateng, 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Tersito, Bandung.
- The Liang Gie, Drs. 1978: Pemerintahan Daerah Di Negara Indonesia, Gung Agung, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik, Dra. & Sinindhia, Y.W., SH. 1987. Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat, Bina Aksara Jakarta.

B. DOKUMEN-DOKUMEN

- Dinas Pertanian Kecamatan Sesean Tahun 1990
- Dinas Peternakan Kecamatan Sesean tahun 1990
- Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap No. IV/MPR/1973
- Hasil Wawancara Pada Tanggal 3 Nopember 1990 Di Kecamatan Sesean.
- Kantor Statistik Kecamatan Sesean tahun 1990, Tentang Luas Panen Dan Produksi Pertanian Kecamatan Sesean.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Lampiran I

DAFTAR SUSUNAN KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSAT DAN DAERAH PADA KANTOR KECAMATAN SESEAN
KEADAAN 31 MARET 1989.

No.	Nama	Nip	Pangkat (Gol. Rng)	Jabatan	Pendidikan	Ket.
1.	Dr. J.L. Mapau	010109137	III/C	Caesat Sesean	Sarjana Ekonomi	UNHAS
2.	J.B. Tombi	010027186	III/b	Mantri Polisi	SMA	-
3.	J. Tuna'	010046802	II/d	Sekwilcam	SMA	-
4.	M.S. Parapak	580045126	III/b	Peg. Staf Kecamatan	SMA	-
5.	D.S. Pasinggi	580008528	III/a	Kaur Adm.	SMA	-
6.	M. Pangala'	580008529	III/a	Kaur Pemerintahan	SPB	-
7.	M.D. Tonapa	580008530	II/d	Kaur Kemasyarakatan	SMA	-
8.	J. Limbong	580009675	II/d	Sek. Korpri	KPAA	-
9.	T. Matandung	580011774	II/d	Peg. Stag Kecamatan	SMA	-
10.	A.K. Matandung	581006455	II/C	Kades Balusu	SMA	-
11.	T.H.S. Patandeanan	010121361	II/C	Lurah Pangli Palawa	SMA	-
12.	P. Patiung	010121448	II/C	Staf Kelurahan	SMA	-
13.	D.S. Patandung	010121447	II/C	Staf Kelurahan	SMA	-
14.	P.T. Patandianan	580001217	II/b	Pej. Kades Lilikira	SMA	-
15.	M.A. Rela	010015098	II/b	Kades Sa'dan Matal	SMA	-
16.	Luter Lobo'	010052333	II/b	Kaur Bangdes	SMA	-
17.	Parapak Bawan	580018168	II/a	Staf Kec. Sesean	SMA	-
18.	J.B. Bintong	580018757	II/a	Staf Kec. Sesean	SMA	-

19.	! Martina Rapi	! 010213511 !	II/a	! Staf Ker, Sesean	! S M A !	-
20.	! E. Paluruan	! 580006074 !	II/b	! Staf Kec, Sesean	! K P A K !	-
21.	! Y.S. Metasik	! 010151131 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S M P !	-
22.	! P. Saana'	! 010121449 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S M P !	-
23.	! H. Pasolang	! 010213558 !	I/C	! Kades Bori' Parinding	! S M P !	-
24.	! Ahmad	! 010134597 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S M P !	-
25.	! Agus Silambi'	! 010213559 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S M P !	-
26.	! D a p p i'	! 010134597 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S M P !	-
27.	! J.R. Tandilolo	! 580018680 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S D !	-
28.	! Yamarlin Mangiri	! 580020467 !	I/C	! Staf Kecamatan Sesean	! S D !	-

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sesean Tahun 1990.

Adapun tugas umum Mantri Pagar Praja adalah :

1. Menyelenggarakan pengamanan fisik dilingkungan Kantor pemerintah Kecamatan.
2. Memimpin satuan pagar praja.
3. Membantu Kepala Wilayah Kecamatan di bidang tugasnya
4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada -kepala wilayah kecamatan tentang langkah/tindakan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Tugas umum urusan pembinaan masyarakat adalah:
 - a. Melaksanakan dan memelihara pencatatan pelaporan tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan masyarakat desa/kelurahan
 - b. Melaksanakan tugas pembinaan lain yang diberikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan

- c. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan terhadap sikap mental masyarakat
- d. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Wilayah tentang langkah/tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Tugas urusan pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan memelihara pencatatan pembuatan laporan tentang kegiatan pembanguna desa.
2. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun rencana pembangunan desa
3. Menyelenggarakan perlombaan desa.
4. Menyelenggarakan administrasi pelaksanaan bantuan desa dan pengawasannya.

Tugas Kepala Kantor Wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Kepala wilayah Kecamatan.
- b. Memimpin pelaksanaan administrasi pemerintahan Wilayah Kecamatan
- c. Menerima, menyetor dan menyimpan hasil pemungutan pajak.
- d. Mengurus uang gaji dan membayar gaji pegawai dalam lingkungan Kantor Wilayah Kecamatan.
- e. Menyusun pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan yang telah dikeluarkan.

Tugas urusan pemerintahan adalah:

1. Melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang program pembangunan desa.
2. Membantu Kepala kantor Wilayah Kecamatan dibidang tugasnya.
3. Melaksanakan dan memelihara pencatatan serta membuat laporan-laporan tentang penyelenggaraan segala kegiatan dibidang pemerintahan.
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan.

Tugas urusan kesejahteraan rakyat adalah:

- a. Melaksanakan pembangunan fisik dan mental secara merata.
- b. Memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat melalui program dibidang kesejahteraan sosial.
- c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan sosial terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- d. Membuat laporan tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Tugas urusan perekonomian adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana dan fasilitas yang berkaitan dengan bidang perekonomian
2. Memupuk dan mengembangkan usaha kerajinan rakyat dan bidang kewiraswastaan lainnya

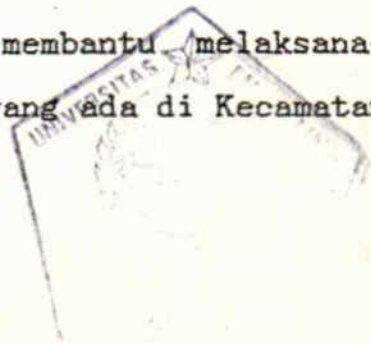
3. Memperbaiki pendapatan masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas terhadap bidang usaha tertentu
4. Meningkatkan bimbingan dan latihan keterampilan bagi kelompok masyarakat dipedesaan

Tugas urusan administrasi adalah:

- a. Menyelenggarakan segala pekerjaan dan memperbanyak surat-surat menurut keperluan.
- b. Menerima dan menggandakan surat masuk dan surat keluar
- c. Menyimpan dan memelihara arsip lama sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk memberikan pertimbangan mengenai penyelesaian administrasi kepegawaian tentang kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan dan lain-lain.

Di dalam melaksanakan tugas kantor wilayah Kecamatan, maka secara intern organisasi kepala Kantor Wilayah, Kepala urusan pembinaan masyarakat dan kepala urusan pembangunan masyarakat desa harus bertanggung jawab kepada Camat baik menyangkut administrasi maupun teknik operasional sedangkan Kepala urusan pemerintahan, kesejahteraan rakyat perekonomian dan administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya membantu urusan-urusan tersebut di atas, juga membantu melaksanakan horizontal (dinas-dinas daerah) yang ada di Kecamatan,



demikian pula Kepala Kecamatan Sesean dalam melaksanakan tugasnya senantiasa melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi tersebut.

Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kecamatan Sesean adalah sebagai berikut :

1. JUPEN (Juru Penerangan) bertugas untuk:

- Memberikan penerangan kepada masyarakat luas,
- Mengumpulkan hal-hal yang perlu dipublikasikan,
- Memperluas informasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan sesuai dengan anjuran pemerintahan.
- Membina dan mengurus generasi muda dan keolahragaan.
- Membina dan meningkatkan pengembangan kebudayaan.

2. DIKBUD (Pendidikan dan Kebudayaan) bertugas untuk:

- Membina dan mengurus Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar dan kewajiban belajar.
- Membina dan mengurus pendidikan masyarakat serta pemberantasan buta huruf dan lain-lain sebagainya.

3. KUA (Kantor Urusan Agama) bertugas untuk:

Bergerak di bidang spritual khususnya bidang keagamaan, pencatatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, dakwah, meningkatkan kerukunan hidup beragama, dan membantu instansi yang bertugas bidang urusan haji.

4. POLSEK (Polisi Sektor) bertugas untuk:

Bidang keamanan dan kriminal yang terjadi di dalam wilayah Kecamatan.

5. Koramil bertugas untuk:

Berwenang dan bertanggung jawab dalam urusan teritorial dan perlawanan rakyat untuk menuju kepada kestabilan keamanan dan urusan yang berhubungan dengan persoalan kemiliteran.

6. Dinas Pertanian bertugas untuk:

Melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang pertanian yang meliputi, bidang penyelenggaraan bimbingan penyuluhan-penyuluhan, pembinaan serta pengembangan tanaman pangan dan program menuju peningkatan produksi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

7. Dinas Peternakan bertugas untuk:

- Melaksanakan bimbingan dibidang produksi ternak potong, ternak unggas, ternak perah, aneka ternak dan inseminasi buatan, penyediaan dan penyebaran teknologi maju dan teknik pengembangannya.
- Melaksanakan penyediaan makanan ternak yang meliputi hijauan, makanan penguat dan pemberantasan penyakit hewan.
- Melaksanakan bimbingan pengujian dan standarnisasi hasil peternakan.
- Melaksanakan pemberian izin untuk pemotongan hewan.

8. Dinas Kehutanan bertugas untuk:

- Untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengembangan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam bidang pengusaha hutan dan pemungutan hasil hutan.
- Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan hasil hutan serta mengadakan sarana dan prasarananya.
- Mengarahkan, membina dan mengawasi kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, pencegahan erosi dan banjir, pengendalian perladangan liar, pemukiman dan penghijauan,
- Mengarahkan, membina dan mengawasi kegiatan di bidang perlindungan hutan serta pengelolaan dan pengembangan aneka guna tanah.

9. Dinas Kesehatan bertugas untuk:

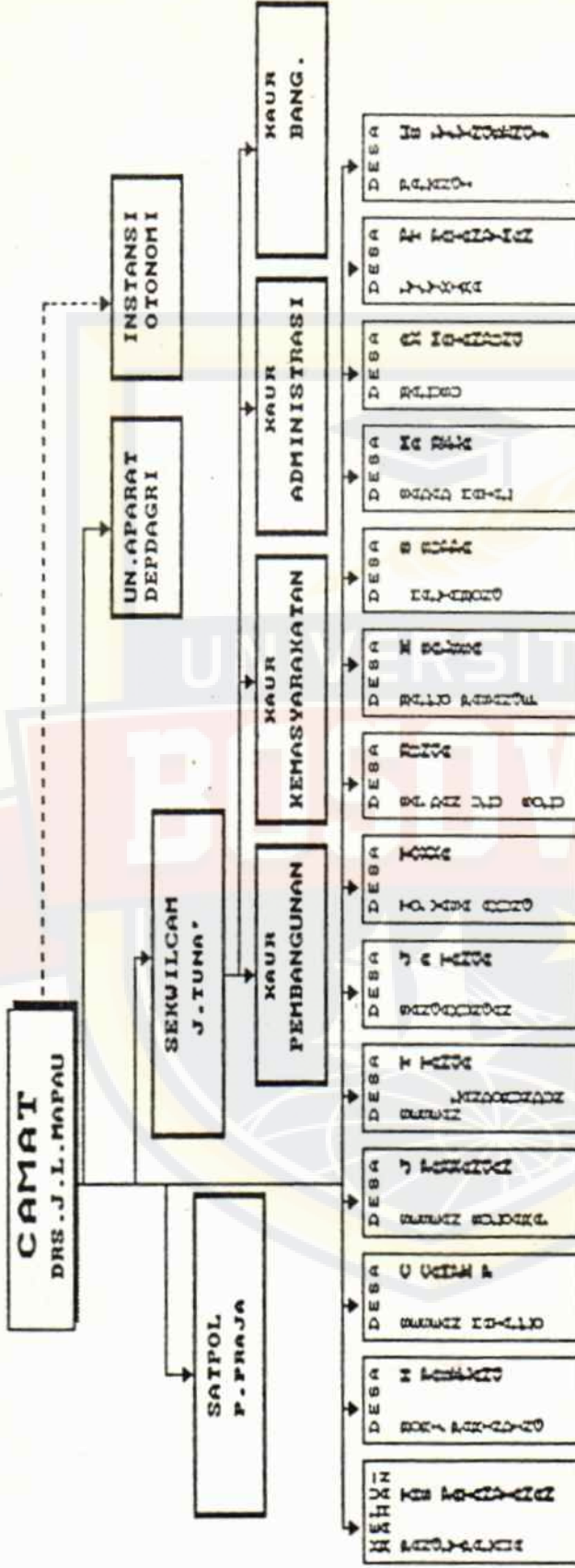
- Mengumpulkan data, mensistematisasikan dan menganalisa data dalam bidang keberhasilan dan kesehatan masyarakat
- Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keberhasilan dan kesehatan masyarakat
- Mengusahakan peningkatan sarana kesehatan di Wilayah Kecamatan
- Bergerak dalam bidang pemberantasan penyakit, wabah melaksanakan pengobatan, keluarga berencana serta penelitian terhadap penyakit menular yang pada pokok

nya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas dari Instansi Vertikal dan Horizontal atau dinas-dinas daerah, Kepala Wilayah Kecamatan Sesean tidak ikut dalam penyusunan rencana kerja maupun pelaksanaannya, tetapi Instansi tersebut dalam menyusun rencana kerjanya meminta saran-saran/pertimbangan-pertimbangan dari Kepala Wilayah Kecamatan, hal ini disebabkan karena kedudukan Camat sebagai Kepala Pemerintahan, yang harus mengetahui segala kegiatan yang terjadi di dalam Wilayahnya.



STRUKTUR ORGANISASI KEMANTORAN KECAMATAN BEBEAN



SUMBER DATA : KANTOR KECAMATAN BEBEAN TAHUN 1996



PETA KECAMATAN SESEAN

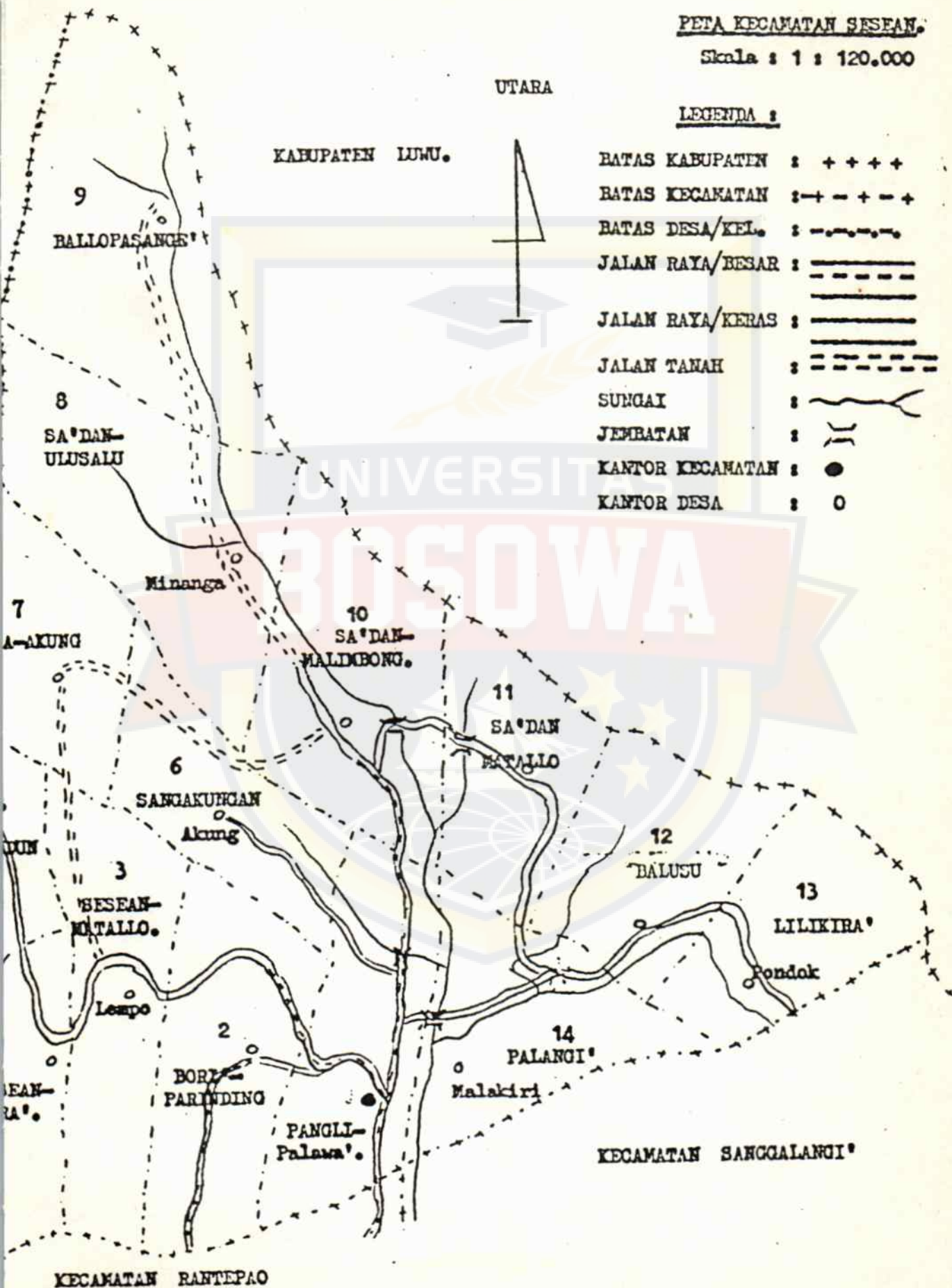
Skala : 1 : 120.000

LEGENDA :

- BATAS KABUPATEN : + + + +
- BATAS KECAMATAN : - + - + - +
- BATAS DESA/KEL. : - - - - -
- JALAN RAYA/BESAR : = = = =
- JALAN RAYA/KERAS : = = = =
- JALAN TANAH : - - - - -
- SUNGAI : ~ ~ ~ ~
- JEMBATAN : () ()
- KANTOR KECAMATAN : ●
- KANTOR DESA : ○

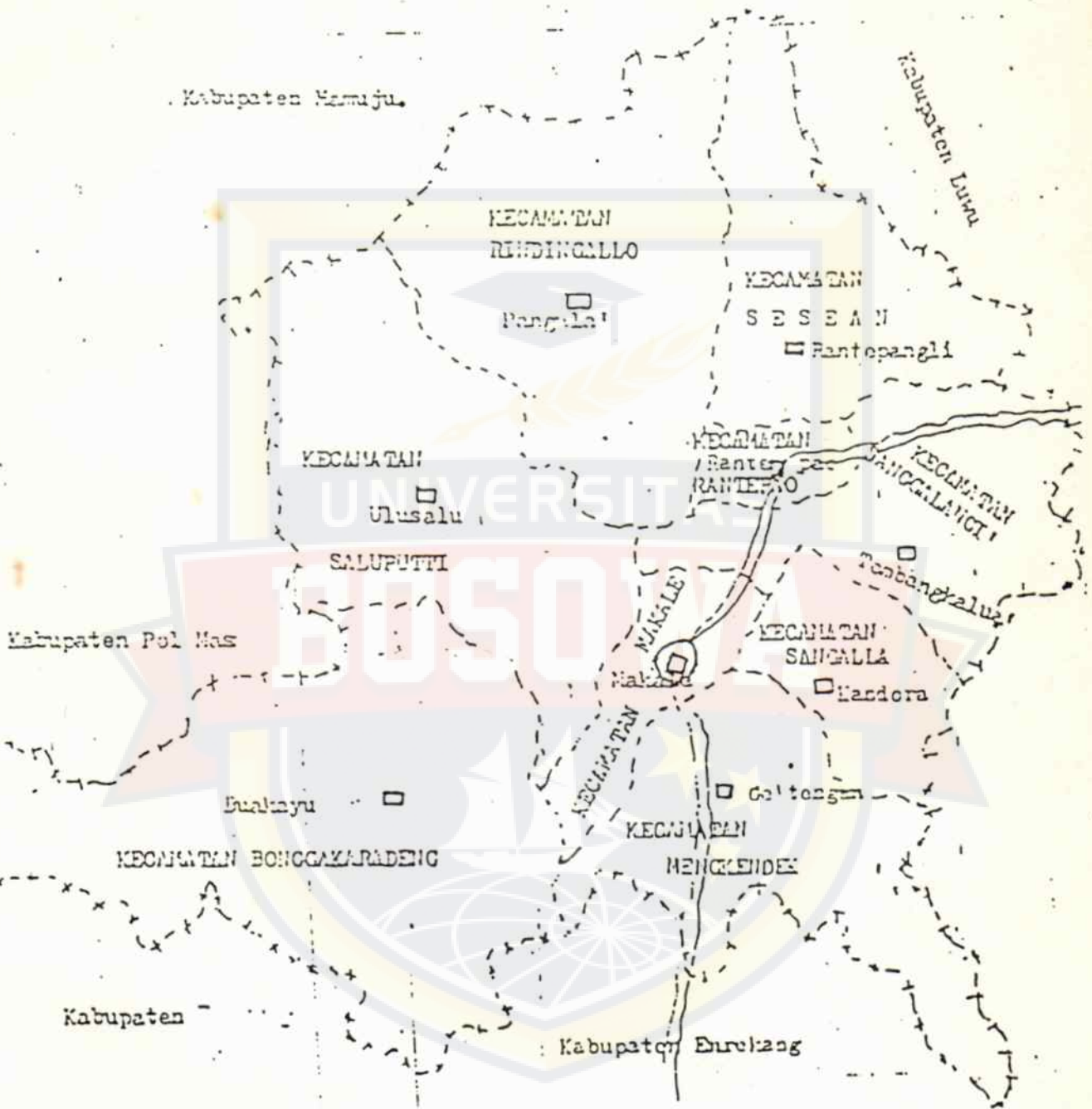
UTARA

KABUPATEN LUWU.



PERA KABUPATEN DATI II TANJA TORAJA.

SKALA 1 : 400.000



KETERANGAN :

(□) Ibu Kota Kabupaten.

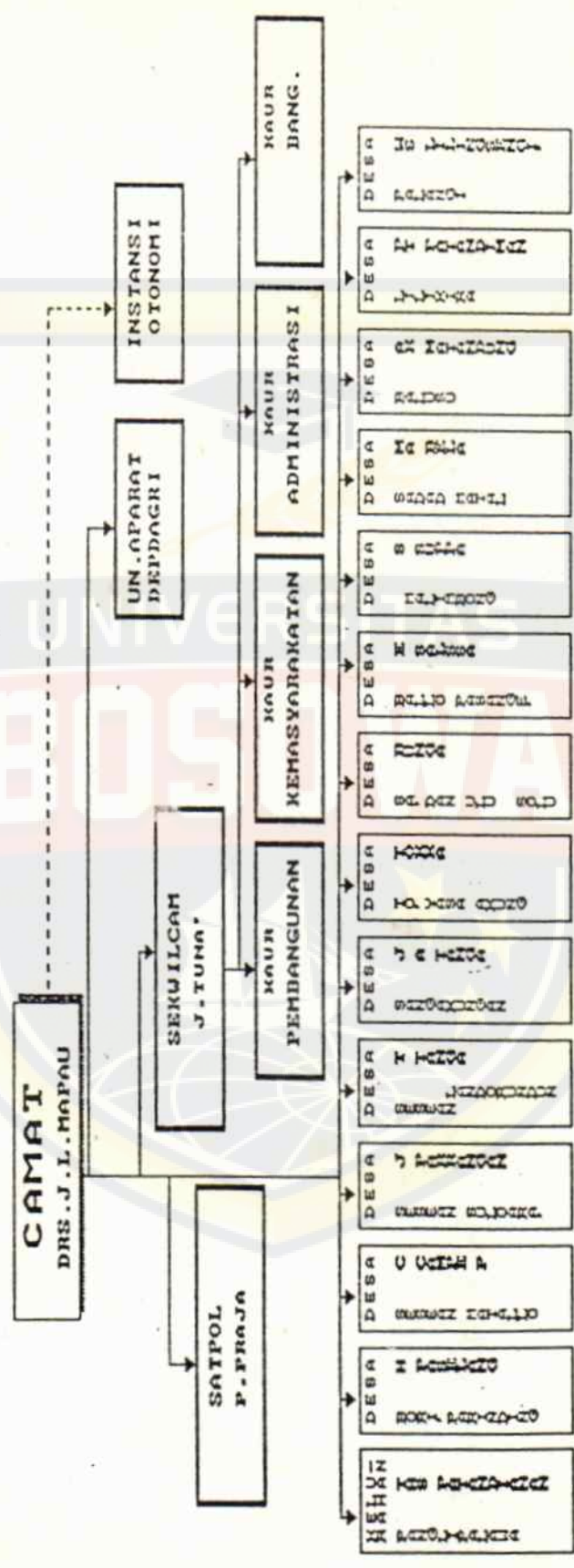
□ Ibu Kota Kecamatan.

== Jalan Negara.

- - - - Batas Kabupaten

- - - - Batas Kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN BESEAN



SUMBER DATA : KANTOR KECAMATAN BESEAN TAHUN 1990

